

SKRIPSI
**PENGARUH UPAYA PAJAK (*TAX EFFORT*) DAN BELANJA
MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI
VARIABEL *INTERVENING***



Oleh

CHRYSTINE AMELIA PRAMESWARI

NIM: 220502110146

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2026

SKRIPSI
**PENGARUH UPAYA PAJAK (*TAX EFFORT*) DAN BELANJA
MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI
VARIABEAL *INTERVENING***

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh

CHRYSTINE AMELIA PRAMESWARI

NIM: 220502110146

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

Pengaruh Upaya Pajak (*Tax Effort*) dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel *Intervening*

SKRIPSI

Oleh

Chrystine Amelia Prameswari

NIM : 220502110146

Telah Disetujui Pada Tanggal 16 April 2026

Dosen Pembimbing,



Sri Andriani, M.Si

NIP. 197503132009122001

LEMBAR PENGESAHAN

Mediating Role of Regional Original Income on Tax Effort, Capital Expenditure,
and Financial Independence

SKRIPSI

Oleh

CHRYSTINE AMELIA PRAMESWARI

NIM : 220502110146

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 24 April 2026

Susunan Dewan Penguji:
Tangan

Tanda

1 Ketua Penguji

Rohmatulloh Salis, M.Pd

NIP.19840930202326



2 Anggota Penguji

Isnan Murdiansyah, M.S.A

NIP. 198607212019031008



3 Sekretaris Penguji

Sri Andriani, M.Si

NIP. 197503132009122001



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Dr. Kholilah, M.S.A

NIP.19870719201903200

HALAMAN PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chrystine Amelia Prameswari

NIM : 220502110146

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa **Sanggup** menyelesaikan tanggungan publikasi artikel jurnal yang akan diterbitkan oleh *Accounting and Finance Studies*, e-ISSN: 2774-4256, Volume 6, Nomor 2 April 2026, dengan judul:

“Mediating Role of Regional Income on Tax Effort, Capital Expenditure, and Financial Independence”

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 13 April 2026



Hormat Saya,

Chrystine Amelia Prameswari
NIM : 220502110146

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chrystine Amelia Prameswari

NIM : 220502110146

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

"Pengaruh Upaya Pajak (*Tax Effort*) dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening"

adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari pihak lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 13 April 2026



Chrystine Amelia Prameswari
NIM: 220502110146

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penelitian yang berjudul “Pengaruh *Tax Effort* dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel *Intervening*” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M.El., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Kholilah, SE., M.S.A., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Sri Andriani, SE., M.Si sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang bersedia memberikan nasihat, saran, dan waktu yang bermanfaat selama proses penyelesaian skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pengetahuan selama kuliah.
6. Ayah dan Mama serta keluarga yang telah memberikan semua yang mereka miliki, termasuk cinta dan kasih sayang mereka. Doa dan dukungan terus-menerus hingga membuat penulis berada pada titik ini.
7. Ucapan terima kasih kepada seseorang yang tidak dapat saya sebutkan namanya, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang selama sembilan tahun ini. Terima kasih untuk setiap doa, dukungan, dan cerita yang pernah kita lalui bersama. Sebagian dari pencapaian ini juga ada karena kehadiranmu. Semoga segala kebaikan selalu menyertaimu.

8. Ucapan terima kasih kepada Akfa & Farid yang telah berkontribusi dalam membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ucapan terima kasih kepada PB angkatan 2022 (Yumna, Adel, Thoriq, Ariq, Farid, Alka, Hasbi dan Rakha) yang selalu hadir dalam suka dan duka, memberikan motivasi, serta menjadi bagian dari perjalanan berharga ini
10. Ucapan terima kasih kepada HIMAGA (Akfa, Devina, Elviera, Natasya dan Imayatin) yang selalu hadir memberikan semangat, bantuan, dan kebersamaan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi
11. Ucapan terima kasih kepada Andina Fara yang telah menjadi teman berkeluh kesah penulis selama masa skripsi
12. Ucapan terima kasih kepada teman-teman akuntansi angkatan 2022 yang telah menjadi teman seperjuangan penulis selama menempuh pendidikan selama menempuh pendidikan.

MOTTO

“Lakukan satu hal setiap hari yang menantang ketakutanmu.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Tax Effort* dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel *Intervening*”. Skripsi ini disusun sebagai bentuk kontribusi ilmiah dalam mengkaji permasalahan kemandirian keuangan daerah yang hingga saat ini masih menjadi isu penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, yang menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri belum optimal. Dalam konteks tersebut, *tax effort* dan belanja modal menjadi instrumen penting dalam kebijakan fiskal daerah yang diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menganalisis hubungan langsung maupun tidak langsung antara variabel-variabel tersebut dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai keterbatasan, baik dari segi analisis maupun penyajian. Namun demikian, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

Malang, 13 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRAC	xviii
المخلص	xix
BAB I	xix
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5. Batasan Penelitian	8
BAB II	9
KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kajian Teoritis.....	15
2.2.1 <i>Stewardship Theory</i>	15
2.2.2 <i>Good Governance Theory</i>	16
2.2.3 <i>Tax Effort</i>	17

2.2.4	Belanja Modal	17
2.2.5	Kemandirian Keuangan Daerah	18
2.2.6	Pendapatan Asli Daerah	19
2.2.7	Kajian Keislaman	20
2.3	Kerangka Konseptual	21
2.4	Hipotesis Penelitian.....	22
2.4.1	Pengaruh Upaya Pajak (<i>Tax Effort</i>) terhadap Pendapatan Asli Daerah	22
2.4.2	Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	23
2.4.3	Pengaruh Upaya Pajak (<i>Tax Effort</i>) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	23
2.4.4	Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	24
2.4.5	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.....	25
2.4.6	Pendapatan Asli Daerah memediasi pengaruh (Upaya Pajak) <i>Tax Effort</i> terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	25
2.4.7	Pendapatan Asli Daerah memediasi pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	26
BAB III.....		28
METODE PENELITIAN		28
3.1	Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	28
3.2	Lokasi Penelitian.....	28
3.3	Populasi Dan Sampel	28
3.3.1	Populasi Penelitian.....	28
3.3.2	Sampel Penelitian.....	29
3.4	Teknik Pengambilan Sampling	29
3.5	Data dan Jenis Data.....	31
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7	Variabel Oprasional	32
3.7.1.	Variabel Dependen.....	32
3.7.2.	Variabel Independen	32

3.7.3.	Variabel Mediasi	33
3.8	Analisis Data	34
3.8.1	Analisis Statistik Deskriptif	35
3.8.2	Analisis Pemilihan Model	35
3.8.3	Analisis Regresi Data Panel	36
3.8.4	Uji Asumsi Klasik	37
3.8.5	Pengujian Hipotesis	39
BAB IV	41
HASIL DAN PEMBAHAN	41
4.1	Hasil Penelitian	41
4.1.1	Analisis Statistik Deskriptif	41
4.1.2	Analisis Pemilihan Model	43
4.1.3	Analisis Regresi Data Panel	48
4.1.4	Pengujian Hipotesis	52
4.2	Pembahasan	58
4.2.1	Pengaruh <i>Tax Effort</i> Terhadap Pendapatan Asli Daerah	58
4.2.2	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah	59
4.2.3	Pengaruh <i>Tax Effort</i> Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	60
4.2.4	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 62	
4.2.5	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	63
4.2.6	Pengaruh <i>Tax Effort</i> Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah	64
4.2.7	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah	66
BAB V	68
PENUTUP	68
5.1	KESIMPULAN	68
5.2	KETERBATASAN	69
5.3	SARAN	69

DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3. 1 Distribusi Sampel.....	30
Tabel 3. 2 Sampel Terpilih.....	30
Tabel 3. 3 Definisi Operasional Variabel.....	33
Tabel 4. 1 Analisis Statistik Deskriptif.....	41
Tabel 4. 2 Hasil Uji Chow Sub 1.....	44
Tabel 4. 3 Hasil Uji Hausman Sub 1.....	44
Tabel 4. 4 Hasil Uji Lagrange Multiplier Sub 1.....	45
Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow Sub 2.....	46
Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman Sub 2.....	47
Tabel 4. 7 Hasil Analisis Regresi Data Panel Sub 1.....	48
Tabel 4. 8 Hasil Analisis Regresi Data Panel Sub 2.....	49
Tabel 4. 9 Hasil Uji Multikolinearitas.....	51
Tabel 4. 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	51
Tabel 4. 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas Sub 2.....	52
Tabel 4. 12 Hasil Uji T Sub 1.....	53
Tabel 4. 13 Hasil Uji T Sub 2.....	53
Tabel 4. 14 Hasil Uji F Sub 1.....	55
Tabel 4. 15 Hasil Uji F Sub 2.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Rata-Rata Kemandirian Keuangan Daerah.....	1
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	22
Gambar 4. 1 Hasil Uji Sobel Sub 1.....	57
Gambar 4. 2 Hasil Uji Sobel Sub 2.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data Awal.....	79
Lampiran 2. 1 Hasil Uji Multikolinearitas.....	84
Lampiran 2. 2 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	84
Lampiran 2. 3 Hasil Uji T.....	85
Lampiran 2. 4 Hasil Uji F.....	85
Lampiran 2. 5 Hasil Koefesien Determinasi	86
Lampiran 2. 6 Hasil Uji Sobel.....	86
Lampiran Biodata Penulis.....	87
Lampiran Hasil Turnitin.....	87

ABSTRAK

Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Namun, dalam praktiknya masih banyak daerah yang bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *tax effort* dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan data panel pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2022–2024, yang dianalisis menggunakan regresi data panel dengan bantuan aplikasi EViews.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax effort* berpengaruh signifikan negatif terhadap PAD dan tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, belanja modal tidak berpengaruh terhadap PAD, namun berpengaruh signifikan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. PAD terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dalam pengujian mediasi, PAD mampu memediasi pengaruh *tax effort* terhadap kemandirian keuangan daerah, tetapi tidak mampu memediasi pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah lebih dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD sebagai sumber pendapatan riil dibandingkan dengan besarnya upaya pemungutan pajak dan alokasi belanja modal. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan PAD menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah secara berkelanjutan.

ABSTRAC

Regional financial independence is an important indicator in assessing the success of regional autonomy implementation. However, in practice, many regions still rely heavily on transfer funds from the central government. This study aims to analyze the effect of tax effort and capital expenditure on regional financial independence, with Regional Original Revenue (PAD) as an intervening variable. This research employs a quantitative method using a panel data approach covering regencies and cities in East Java Province for the period 2022–2024, analyzed through panel data regression using EViews software.

The findings reveal that tax effort has a significant negative effect on PAD and does not directly affect regional financial independence. Meanwhile, capital expenditure does not influence PAD but has a significant negative effect on regional financial independence. On the other hand, PAD has a positive and significant effect on regional financial independence. In terms of mediation analysis, PAD is able to mediate the relationship between tax effort and regional financial independence, but it does not mediate the effect of capital expenditure.

The study concludes that regional financial independence is more strongly determined by the ability of local governments to enhance PAD as a source of real revenue, rather than by the magnitude of tax collection efforts and capital expenditure allocation. Therefore, optimizing PAD management is a key factor in improving sustainable regional financial independence.

المخلص

أن يظهر الواقع أن إلا، المحلي الذاتي الحكم تطبيق نجاح تقييم في مهماً مؤشراً الإقليمي المالي الاستقلال يُعدّ الدراسة هذه تهدف. المركزية الحكومة من المالية التحويلات على كبير بشكل تعتمد تزال لا المناطق من العديد الإيرادات اعتبار مع، الإقليمي المالي الاستقلال على الرأسمالي والإنفاق الضريبي الجهد تأثير تحليل إلى لمستوى بانل بيانات باستخدام الكمي المنهج على الدراسة وتعتمد. وسيط كمتغير (PAD) المحلية الأصلية نموذج باستخدام البيانات تحليل وتم، 2022-2024 الفترة خلال الشرقية جاوة إقليم في والمدن المحافظات EViews. برنامج عبر اللوحة للبيانات الانحدار.

يؤثر ولا، (PAD) المحلية الأصلية الإيرادات على معنوي سلبي تأثير له الضريبي الجهد أن النتائج أظهرت يُظهر لكنه، (PAD) على يؤثر لا الرأسمالي الإنفاق أن حين في. الإقليمي المالي الاستقلال على مباشر بشكل ومعنوي إيجابي تأثير له (PAD) أن تبين، المقابل وفي. الإقليمي المالي الاستقلال على معنوياً سلبياً تأثيراً الجهد بين العلاقة يتوسط (PAD) أن ثبت فقد، الوساطة باختبار يتعلق فيما أما. الإقليمي المالي الاستقلال على الرأسمالي الإنفاق تأثير يتوسط لا لكنه، الإقليمي المالي والاستقلال الضريبي.

على المحلية الحكومات قدرة خلال من أكبر بشكل يتحدد الإقليمي المالي الاستقلال أن إلى الدراسة وتخلص تخصيص أو الضريبي التحصيل جهود بحجم مقارنةً، للدخل فعلي كمصدر المحلية الأصلية الإيرادات تعزيز الإقليمي المالي الاستقلال تحقيق في أساسياً عاملاً يُعد (PAD) إدارة تحسين فإن، وعليه. الرأسمالي الإنفاق مستدام بشكل.

BAB I

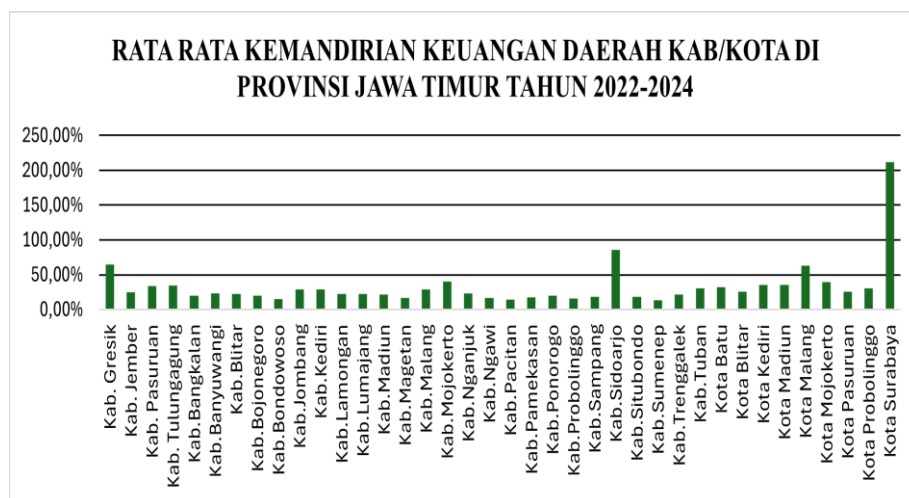
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kemampuan fiskal mandiri daerah menjadi indikator kunci untuk mengukur keberhasilan otonomi daerah di bawah prinsip desentralisasi fiskal Indonesia, hal ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menyediakan pembangunan dan layanan publik secara mandiri, dengan sedikitnya ketergantungan pada pusat (Halim & Kusufi, 2018). Meskipun demikian, realitas fiskal daerah di Indonesia masih problematis, sebagaimana terlihat dari dominasi dana transfer pusat sebagai sumber pendapatan utama daerah (Haptari et al., 2024). Pada tingkat nasional, komposisi pendapatan daerah sebagian besar bergantung pada dana transfer tersebut, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap terbatas (Kompas, 2024). Situasi ini menggambarkan berkurangnya kekuatan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan secara swadaya (Kompas, 2025).

Gambar 1 1

Rata Rata Kemandirian Keuangan Daerah



Sumber: DJPK Kemenkeu, diolah peneliti tahun 2025

Situasi tersebut pun dialami Provinsi Jawa Timur, dengan rasio kemandirian fiskal daerah selama periode 2022–2024 yang masih masuk kategori rendah sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1 (Halim & Kusufi, 2018). Penilaian ini mengacu pada klasifikasi rasio kemandirian keuangan daerah (Haptari et al., 2024). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur belum berhasil memaksimalkan sumber pendapatan daerahnya untuk membiayai keperluan fiskal lokal (Zein et al., 2024). Rendahnya rasio kemandirian tersebut merupakan isu krusial karena dapat membatasi keleluasaan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan memperbesar ketergantungan pada kebijakan fiskal pemerintah pusat (Mardiasmo, 2021).

Pada ranah pengelolaan keuangan daerah, *Stewardship Theory* serta *Good Governance Theory* berfungsi sebagai fondasi teoritis yang menguraikan cara pemerintah daerah menata sumber daya publik dengan tepat (Donaldson & Davis, 1991; Mardiasmo, 2021). *Stewardship Theory* memandang pemerintah daerah sebagai pemegang amanah yang bertugas mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di antaranya lewat pemaksimalan pendapatan daerah semisal Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Donaldson & Davis, 1991). *Good Governance Theory*, di sisi lain, menonjolkan urgensi transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pencatatan keuangan daerah, mencakup aspek penerimaan melalui upaya perpajakan maupun pengeluaran melalui belanja modal (Mardiasmo, 2021). Dalam kerangka tersebut, keberhasilan pemerintah daerah menggenjot PAD melalui pemaksimalan upaya perpajakan dan pengelolaan modal belanja yang efektif mencerminkan mutual tata kelola keuangan daerah yang prima, yang ujung-ujungnya mendukung pemberdayaan kemandirian fiskal daerah (Zein et al., 2024).

Permasalahan rendahnya kemandirian keuangan daerah tidak terlepas dari belum optimalnya efektivitas instrumen kebijakan fiskal daerah, khususnya upaya pajak dan modal belanja, dalam meningkatkan PAD sebagai sumber

utama pembiayaan daerah (Alazhari et al., 2025). Tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah menunjukkan bahwa kontribusi PAD masih relatif rendah dan belum mampu menjadi sumber utama pendapatan daerah, yang mencerminkan lemahnya kemampuan daerah dalam menggali potensi fiskalnya (Haptari et al., 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan kebijakan fiskal yang dijalankan sehingga meningkatkan pendapatan daerah secara maksimal (Zein et al., 2024)

Tax effort merupakan indikator penting dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sesuai potensi ekonomi yang dimiliki (Hartono & Alvionita, 2021). Dalam perspektif *Stewardship Theory*, pemerintah daerah bertanggung jawab memaksimalkan potensi pajak guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak untuk meningkatkan PAD (Donaldson & Davis, 1991; Rahayu & Hendaris, 2025). Namun dalam praktiknya, upaya tersebut belum optimal akibat keterbatasan sistem administrasi, rendahnya pemenuhan wajib pajak, serta lemahnya pengawasan (Alazhari et al., 2025). Selain itu, modal belanja juga berperan strategis dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang mendorong aktivitas ekonomi, yang dalam perspektif *Good Governance* harus dikelola secara efisien dan diarahkan pada sektor produktif agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas basis pajak, dan meningkatkan PAD (Ariyanto & Masdjojo, 2025; Mardiasmo, 2021; Zein et al., 2024). Namun demikian, realisasinya belum sepenuhnya optimal karena belum sepenuhnya terfokus pada sektor produktif (Azzahra et al., 2023). PAD sendiri merupakan indikator utama kemampuan fiskal daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari sumber internal, di mana dalam perspektif *Stewardship* dan *Good Governance*, peningkatan PAD menunjukkan pengelolaan sumber daya publik yang optimal, transparan, dan akuntabel, sehingga semakin besar kontribusinya terhadap pendapatan daerah

maka semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah (Donaldson & Davis, 1991; Khairi et al., 2025; Mardiasmo, 2021)

Secara kontekstual, hubungan antara upaya perpajakan, modal belanja, PAD, dan kemandirian keuangan daerah tidak selalu bersifat langsung, melainkan dapat terjadi melalui mekanisme tidak langsung dengan melibatkan PAD sebagai variabel *intervening* (Pramesti & Budi, 2025). Dalam perspektif teori, peningkatan upaya pajak dan modal belanja tidak secara otomatis meningkatkan kemandirian keuangan daerah apabila tidak ditiru oleh peningkatan PAD sebagai hasil nyata dari kebijakan tersebut (Alazhari et al., 2025). Oleh karena itu, PAD berperan sebagai variabel kunci yang menjembatani hubungan antara kebijakan fiskal daerah dan tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, PAD berperan sebagai variabel kunci yang menjembatani hubungan antara kebijakan fiskal daerah dan tingkat kemandirian keuangan daerah (Khairi et al., 2025).

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait hubungan antara upaya pajak, modal belanja, PAD, dan kemandirian keuangan daerah. Beberapa penelitian menemukan bahwa upaya perpajakan dan modal belanja berpengaruh positif terhadap PAD dan kemandirian keuangan daerah (Ariyanto & Masdjojo, 2025; Rahayu & Hendaris, 2025). Namun, penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda, di mana upaya pajak tidak berpengaruh atau bahkan berpengaruh negatif terhadap PAD maupun kemandirian keuangan daerah (Frijunita et al., 2024; Septiani et al., 2026). Selain itu, modal belanja juga tidak selalu menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PAD maupun kemandirian keuangan daerah (Azzahra et al., 2023). Ketidakkonsistenan temuan tersebut mengindikasikan adanya keganjilan penelitian yang masih perlu dikaji lebih lanjut (Haptari et al., 2024).

Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung fokus pada hubungan langsung antar variabel tanpa mempertimbangkan peran PAD sebagai variabel *intervening* dalam menjelaskan hubungan tersebut (Pramesti & Budi, 2025). Padahal, secara teoritis dalam perspektif *Stewardship* dan *Good*

Governance, kemandirian keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengkonversi kebijakan fiskal menjadi pendapatan riil daerah (Zein et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menjelaskan mekanisme hubungan tidak langsung melalui PAD sebagai variabel *intervening*.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki kebaruan dengan memasukkan PAD sebagai variabel *intervening* dalam menganalisis pengaruh upaya pajak dan modal belanja terhadap kemandirian keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini menggunakan data terbaru dan fokus pada Provinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik fiskal yang beragam, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kemandirian keuangan daerah (Haptari et al., 2024).

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh upaya pajak dan modal belanja terhadap kemandirian keuangan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel *intervening*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik serta menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah secara berkelanjutan (Mardiasmo, 2021).

1.2.Rumusan Masalah

1. Apakah *Tax Effort* (upaya pajak) memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2022–2024?
2. Apakah belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2022–2024?

3. Apakah *Tax Effort* (upaya pajak) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2022–2024?
4. Apakah belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2022–2024?
5. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2022–2024?
6. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) mampu memediasi pengaruh *Tax Effort* (upaya pajak) terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2022–2024?
7. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) mampu memediasi pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2022–2024?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh *Tax Effort* (upaya pajak) terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2022–2024.
2. Menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2022–2024.
3. Menganalisis pengaruh *Tax Effort* (upaya pajak) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2022–2024.
4. Menganalisis pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2022–2024.

5. Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2022–2024.
6. Menganalisis peran pendapatan asli daerah (PAD) sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara *Tax Effort* (upaya pajak) dan kemandirian keuangan daerah.
7. Menganalisis peran pendapatan asli daerah (PAD) sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara belanja modal dan kemandirian keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana ilmiah di bidang keuangan publik dan otonomi daerah. Temuan yang diperoleh diproyeksikan memberikan kontribusi konseptual melalui pembuktian empiris terbaru mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian fiskal pada Kabupaten/Kota Lebih spesifik, penelitian ini berupaya mengatasi kesenjangan literatur (*research gap*) melalui pengujian peran mediasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada keterkaitan upaya pajak (*tax Effort*) dan belanja modal dengan derajat kemandirian fiskal daerah. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi penting sekaligus dasar bagi pengembangan model teoretis pada penelitian selanjutnya, serta memperdalam pemahaman konseptual mengenai keterkaitan antarvariabel dalam konteks desentralisasi fiskal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) Provinsi Jawa Timur, temuan penelitian ini dapat dipakai sebagai instrumen diagnostik guna evaluasi kondisi fiskal daerah secara menyeluruh. Informasi terkait pengaruh signifikan dari upaya pajak (*tax effort*) dan alokasi belanja modal menjadi dasar berbasis bukti (*evidence-based*) dalam perumusan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran. Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran strategis Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel

mediasi utama dapat membantu pemerintah daerah melakukan penyesuaian arah kebijakan fiskal. Dengan demikian, fokus kebijakan tidak hanya terpusat pada penyerapan anggaran, tetapi juga diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber PAD agar lebih produktif. Secara keseluruhan, penelitian ini menawarkan rekomendasi praktis untuk mempercepat terwujudnya kemandirian fiskal daerah, yang berperan penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap transfer dana pusat sekaligus memperkuat kemampuan daerah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas secara mandiri.

1.5. Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan periode pengamatan tahun 2022 hingga 2024. Data yang digunakan bersumber dari Laporan Realisasi APBD yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta didukung oleh data tambahan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Table 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul penelitian	Variabel dan Indikator Fokus Penelitian	Metode/Analisis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Damita Damayanti, Anwar Made & Ati Retnasari (2021) <i>The Effect of Local Own Income and Transfer Funds on Fiscal Independence with Capital Expenditures as an Intervening Variable</i>	Independen (x): 1. Pendapatan Asli Daerah Dependen (y) : 1. Kemandirian Keuangan Daerah Mediasi (Z) 1. Belanja Modal	Kuantitatif, Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2016–2019, Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Penelitian ini menemukan bahwa Belanja Modal tidak mampu memediasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

NO	Nama, Tahun, Judul penelitian	Variabel dan Indikator Fokus Penelitian	Metode/Analisis Penelitian	Hasil Penelitian
2	Doddy Setiawan & Jaka Winarna (2022) <i>The Determinants of Local Government Performance</i>	Independen (x): 1. Belanja Modal Dependen (y): 1. Kemandirian Keuangan Daerah	Kuantitatif, Pemerintah Daerah Tingkat II di Pulau Jawa, Indonesia Tahun 2016-2019, regresi berganda	Belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah
3	Yuliana Eka Purwati & Amrie Firmansyah (2022) Peran Moderasi Kualitas Laporan Keuangan dalam Hubungan Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal	Independen (x): 1. Kemandirian Keuangan Daerah Dependen (y): 1. Belanja Modal	Kuantitatif, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) di Indonesia selama periode 2016–2019, Analisis Regresi Data Panel	Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal

NO	Nama, Tahun, Judul penelitian	Variabel dan Indikator Fokus Penelitian	Metode/Analisis Penelitian	Hasil Penelitian
4	Eka Pradana Mahardika (2022) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019)	Independen (x): 1. Belanja Modal Dependen (y) : 1. Kinerja Keuangan Daerah (diukur dengan rasio kemandirian)		Belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah
5	Riza & Zuripal (2023) Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, Efektifitas PAD dan <i>Tax Effort</i> terhadap Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kota Bukittinggi	Independen (x) : 1. <i>Tax Effort</i> Dependen (y) : 1. Kemandirian Daerah	Kuantitatif, data sekunder dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi periode 2018–2022	Tax Effort terhadap Kemandirian Daerah Berpengaruh positif signifikan

NO	Nama, Tahun, Judul penelitian	Variabel dan Indikator Fokus Penelitian	Metode/Analisis Penelitian	Hasil Penelitian
6	Avina Azzahra,Rita Martini & Bainil Yulina (2023) <i>Government Financial Performance Provincial Regions in Indonesia: The Effect of Capital Expenditure, Remaining Budget Financing, and Prosperity Rate</i>	Independen (x): 1. Belanja Modal Dependen (y) : 1. Kinerja Keuangan Daerah (diukur dengan rasio kemandirian)	Kuantitatif, Provinsi di Indonesia selama periode 2017–2021, Analisis Regresi Data Panel	Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah
7	Mohamad Harry Mulya Zein, Muhtarom Muhtarom, Mulyadi Mulyadi & Sisca Septiani (2024) <i>Examining the Role of Local Government's Financial Performance and Capital Expenditure in Increasing Economic Growth in Banten Province, Indonesia (2018–2022)</i>	Dependen (y) : 1. Belanja Modal Independen (x): 1. Kemandirian Keuangan Daerah	Kuantitatif, data sekunder Provinsi Banten 2018-2022, analisis jalur (<i>path analysis</i>) dengan SPSS software	Kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal

No	Nama, Tahun, Judul penelitian	Variabel dan Indikator Fokus Penelitian	Metode/Analisis Penelitian	Hasil Penelitian
8	<p>Sudarwinti & Bahrul Ulum Rusyd (2025)</p> <p><i>The Influences of the Flypaper Effect and Fiscal Stress on Provincial Financial Performance in Sulampua Island with Tax effort as an Intervening Variabel</i></p>	<p>Mediasi (Z) :</p> <p>1. <i>Tax Effort</i></p> <p>Dependen (y) :</p> <p>1. Kinerja Keuangan Daerah (diukur dengan rasio kemandirian)</p>	<p>Metode studi literatur kuantitatif, Terdiri dari 80 poin data cross-section dari 10 provinsi di Pulau Sulampua periode 2016-2023</p>	<p><i>Tax effort</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah</p>
9	<p>Mutiara Andika Alazhari & R. Budi Hendaris (2025)</p> <p><i>Tax Effort, Flypaper Dynamics, and Fiscal Stress: An Empirical Study of Regional Financial Independence.</i></p>	<p>Independen (x) :</p> <p>1. <i>Tax Effort</i></p> <p>Dependen (y) :</p> <p>1. Kemandirian Keuangan Daerah</p>	<p>Kuantitatif kausal-asosiatif, teknik sensus yang mencakup seluruh populasi, yaitu 18 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Barat</p>	<p><i>Tax effort</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah</p>
10	<p>Yunita Sri Rahayu & Raden Budi Hendaris (2025)</p> <p>Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Ketergantungan Daerah dan Upaya Pajak terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di</p>	<p>Independen (x) :</p> <p>1. <i>Tax Effort</i></p> <p>Dependen (y) :</p> <p>1. Kinerja Keuangan Daerah (diukur dengan rasio kemandirian)</p>	<p>Kuantitatif, kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2019–2023, Analisis Regresi Data Panel</p>	<p>Upaya Pajak (<i>Tax Effort</i>) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p>

NO	Nama, Tahun, Judul penelitian	Variabel dan Indikator Fokus Penelitian	Metode/Analisis Penelitian	Hasil Penelitian
	Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023)			
11	<p>Radina Ayuningtyas, Gardina Aulin Nuha & Achmad Syahfrudin Zulkarnaeni (2025)</p> <p><i>Determinants of Regional Financial Independence: A Study of Local Taxes, Balancing Funds and Capital Expenditure in East Java (2020-2023)</i></p>	<p>Independen (x):</p> <p>1. Belanja Modal</p> <p>Dependen (y) :</p> <p>1. Kemandirian Keuangan Daerah</p>	<p>Kuantitatif, Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2020–2023. Analisis Regresi Data Panel</p>	<p>Belanja Modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.</p>
12	<p>Nuru Nisa Pramesti & Raden Budi Hendaris (2025)</p> <p><i>The Effect of Capital Expenditure on Financial Performance with Local Revenue as a Mediating Variable</i></p>	<p>Dependen (y) :</p> <p>1. Kinerja Keuangan (diukur melalui rasio kemandirian daerah)</p> <p>Independen (x):</p> <p>1. Belanja Modal</p> <p>Mediasi (z):</p> <p>1. Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>Kuantitatif , Data sekunder 38 pemerintah daerah (kabupaten dan kota) di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022</p>	<p>Belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Pengaruh Mediasi PAD adalah Belanja modal melalui PAD memiliki dampak positif dan signifikan</p>

N O	Nama, Tahun, Judul penelitian	Variabel dan Indikator Fokus Penelitian	Metode/Analisis Penelitian	Hasil Penelitian
				terhadap kinerja keuangan

Sumber :Diolah Peneliti 2026

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 *Stewardship Theory*

Stewardship Theory menguraikan bahwa pengelola organisasi berfungsi sebagai steward yang bertugas mengatur sumber daya secara maksimal demi kepentingan pemilik atau masyarakat secara umum (Donaldson & Davis, 1991). Dalam ranah sektor publik, pemerintah daerah tampil sebagai penerima amanah masyarakat guna menyelenggarakan keuangan daerah dengan efektif dan bertanggung jawab (Mardiasmo, 2021).

Dari sudut pandang itu, pemerintah daerah tidak hanya memprioritaskan urusan administratif, melainkan juga memiliki kewajiban moral guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan keuangan daerah yang maksimal (Donaldson & Davis, 1991). Situasi ini digambarkan pada usaha penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya pemaksimalan pajak sebagai sumber penerimaan daerah primer (Alazhari et al., 2025). Semakin maksimal pemerintah daerah menggali potensi pajak daerah, semakin kuat kapasitas daerah menggenjot PAD sebagai wujud akuntabilitas pada publik (Rahayu & Hendaris, 2025).

Selain itu, *Stewardship Theory* juga menjelaskan bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD mencerminkan kemampuan dalam mengelola sumber daya publik secara efektif (Khairi et al., 2025). Dalam penelitian ini, PAD digunakan

sebagai indikator utama yang menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengkonversi kebijakan fiskal, seperti *tax effort* dan belanja modal, menjadi pendapatan riil daerah (Pramesti & Budi, 2025). Dengan demikian, peningkatan PAD menjadi wujud nyata dari keberhasilan peran pemerintah sebagai *steward* dalam mencapai kemandirian keuangan daerah (Yuliana & Usman, 2022).

2.2.2 *Good Governance Theory*

Good Governance Theory menyoroti urgensi transparansi, akuntabilitas, plus efisiensi pada akuntansi keuangan publik demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang prima (Mardiasmo, 2021). Dalam kerangka keuangan daerah, teori ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah wajib memberi kuasa pada pengelolaan pendapatan serta belanja daerah secara maksimal untuk mendorong kesejahteraan masyarakat (Zein et al., 2024).

Dari perspektif itu, upaya pajak menggambarkan kapabilitas pemerintah daerah menyelenggarakan penerimaan daerah secara transparan dan akuntabel melalui pemaksimalan pajak daerah (Hartono & Alvionita, 2021). Di sisi lain, modal belanja mengilustrasikan saling penataan anggaran daerah, dengan alokasi anggaran yang harus difokuskan pada sektor produktif guna menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan (Ariyanto & Masdjojo, 2025).

Good Governance Theory pun menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan keuangan daerah bukan hanya dari volume anggaran yang dibelanjakan, namun dari outcome yang diperoleh, yakni penguatan PAD dan kemandirian fiskal daerah (Mardiasmo, 2021). Pada penelitian ini, PAD dijadikan tolok ukur primer yang menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah menata kebijakan fiskal secara efisien serta akuntabel (Khairi et al., 2025). Oleh karena itu, semakin prima tata kelola fiskal daerah, semakin besar potensi daerah memperkuat PAD dan kesenjangan kemandirian fiskal daerah (Zein et al., 2024).

2.2.3 *Tax Effort*

Upaya pajak jadi tolok ukur untuk nilai kapabilitas pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan pajak sejalan dengan potensi ekonomi yang ada (Hartono & Alvionita, 2021). Konsep ini menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah melakukan intensifikasi serta ekstensifikasi pajak demi penguatan pendapatan daerah (Rahayu & Hendaris, 2025). Secara operasional, upaya perpajakan tampil sebagai alat utama untuk meningkatkan PAD, karena pajak daerah menjadi tidak dominan dalam struktur pendapatan daerah. Dari sudut *Stewardship Theory*, penguatan upaya pajak (*tax effort*) mencerminkan komitmen pemerintah daerah menjalankan kewajibannya memaksimalkan penerimaan daerah untuk kesejahteraan masyarakat (Donaldson & Davis, 1991).

Meski begitu, keberhasilan upaya perpajakan tidak hanya ditentukan oleh volume pemungutan pajak, tetapi juga faktor lain semisal sistem administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan kapabilitas institusi pemerintah daerah (Alazhari et al. 2025). Oleh karena itu, upaya penguatan pajak tidak selalu menghasilkan kenaikan PAD jika tidak didukung sistem pengelolaan yang memadai.

2.2.4 **Belanja Modal**

Belanja modal yaitu pengeluaran pemerintah daerah yang mengalokasikan perolehan aset tetap beri manfaat panjang, semisal bangun infrastruktur dan menyediakan fasilitas publik (Mardiasmo, 2021). Pengeluaran ini mempunyai peran kunci mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi warga. Dalam kerangka *Good Governance*, modal belanja wajib ditata efisien serta terfokus pada sektor produktif agar tercipta nilai tambah ekonomi (Zein et al., 2024). Belanja modal yang efektif bisa menghasilkan aktivitas ekonomi, kebutuhan dasar pajak, dan akhirnya mendorong penguatan PAD (Ariyanto & Masdjojo, 2025).

Namun demikian, keberhasilan modal belanja tergantung pada rencana dan kebijakan pelaksanaan masing-masing. Jika alokasi modal belanja tidak terfokus pada sektor produktif, efeknya pada penguatan PAD dan kemandirian fiskal daerah menjadi kurang maksimal (Azzahra et al., 2023).

2.2.5 **Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian fiskal daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan secara mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Yuliana & Usman, 2022). Tingkat kemandirian ini menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, karena menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola serta memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik (Halim & Kusufi, 2018). Secara operasional, kemandirian fiskal diukur melalui rasio kemandirian, yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah atau dana transfer, yang menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat (Halim & Kusufi, 2018). Semakin tinggi nilai rasio tersebut, maka semakin besar kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri, sehingga mencerminkan kondisi keuangan daerah yang lebih stabil dan berkelanjutan (Yuliana & Usman, 2022).

Dari perspektif teori, kemandirian fiskal daerah menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah tata sumber daya publik yang efektif dan efisien melalui kebijakan fiskal yang pas (Mardiasmo, 2021). Penguatan kemandirian fiskal daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pendapatan yang bersifat mandiri (Khairi et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD yang diperoleh, maka semakin besar pula peluang daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer serta meningkatkan fleksibilitas

dalam pengambilan kebijakan fiskal (Zein et al., 2024). Oleh karena itu, pemaksimalan PAD jadi elemen sentral kemandirian fiskal daerah, karena PAD menggambarkan hasil konkret pengelolaan potensi ekonomi daerah secara berkelanjutan (Khairi et al., 2025).

2.2.6 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan daerah dari sumber internal semisal pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain-lain sah (Khairi et al., 2025). PAD jadi tolok ukur primer nilai kapabilitas fiskal daerah karena gambaran kemampuan daerah biayai pembangunan dan layanan publik mandiri tanpa ketergantungan tinggi di pusat (Yuliana & Usman, 2022). Semakin dominan kontribusi PAD pada total pendapatan daerah, semakin tinggi derajat kemandirian fiskal daerah (Halim & Kusufi, 2018). Dari sudut *Stewardship Theory*, penguatan PAD mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah tata dan memaksimalkan sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat (Donaldson & Davis, 1991). Di sisi lain, dari kerangka *Good Governance*, PAD ilustrasikan mutu penataan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien hasilkan pendapatan daerah (Mardiasmo, 2021).

Pada penelitian ini, PAD tampil sebagai variabel intervening karena jadi jembatan antara kebijakan fiskal daerah yaitu upaya pajak dan modal belanja dengan kemandirian fiskal daerah (Pramesti & Budi, 2025). Secara kontekstual, penguatan upaya pajak menggambarkan usaha pemerintah memaksimalkan penerimaan pajak daerah, sementara belanja modal mendorong aktivitas ekonomi perluas basis pajak daerah (Zein et al., 2024). Meski demikian, kebijakan kedua tidak secara langsung memperkuat kemandirian fiskal daerah jika tidak menghasilkan penguatan PAD sebagai pendapatan riil daerah (Alazhari et al., 2025). Oleh karena itu, PAD jadi variabel esensial menjelaskan jalur tak langsung antara kebijakan fiskal dan kemandirian fiskal daerah, di mana

penguatan upaya pajak dan modal belanja harus terlebih dahulu meningkatkan PAD sebelum memberikan efek pada pemberdayaan kemandirian fiskal daerah (Khairi et al., 2025).

2.2.7 Kajian Keislaman

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan dan pengelolaan keuangan daerah dipandang sebagai amanah besar yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Upaya dalam mencapai kemandirian keuangan daerah merupakan bentuk pelaksanaan amanah tersebut secara penuh tanggung jawab. Dalam konteks ini, *tax effort* dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk gotong royong (*ta'awun*) serta wujud rasa syukur atas sumber daya yang dianugerahkan Allah kepada suatu daerah.

Prinsip dasar ekonomi Islam juga menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya secara produktif, bukan sekadar konsumtif. Dalam hal ini, belanja modal memiliki peran strategis sebagai bentuk investasi publik jangka panjang. Alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan sarana produktif lainnya dapat dianalogikan sebagai “menanam benih kebaikan”, sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Al-Baqarah: 261.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir ada seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 261)

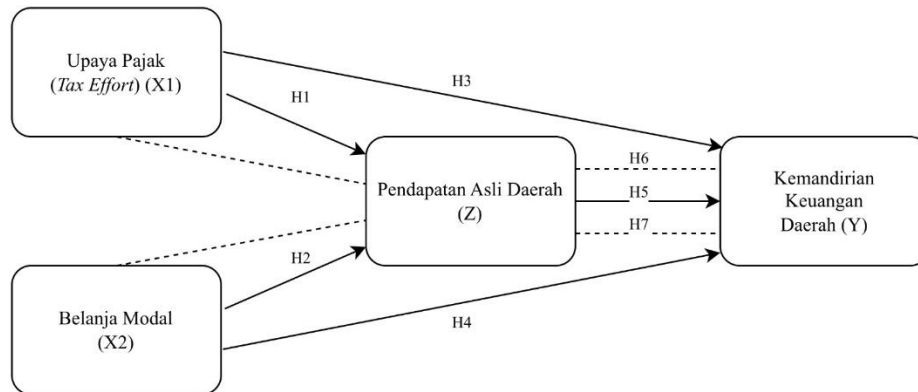
Menurut Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap kebajikan yang dilakukan secara tulus dan tepat sasaran tidak akan berkurang nilainya, melainkan akan berkembang secara berkelanjutan dan berlipat ganda. Dalam konteks pembangunan daerah, belanja modal dapat dianalogikan sebagai “benih” yang ditanam oleh pemerintah. Apabila dikelola dengan prinsip amanah, maka investasi pada aset fisik tersebut akan menghasilkan “bulir-bulir” ekonomi baru yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat.

Keterkaitannya dengan kemandirian keuangan daerah terletak pada hasil akhir dari proses tersebut. Setiap alokasi anggaran dalam belanja modal diharapkan mampu menciptakan *multiplier effect* yang memperluas basis pajak dan retribusi sebagai komponen PAD. Ketika hasil tersebut berkembang secara optimal dan berkelanjutan, maka daerah akan mencapai tingkat kemandirian keuangan yang lebih kuat. Dengan demikian, kemandirian keuangan daerah tidak hanya dipahami sebagai nilai rasio semata, tetapi sebagai hasil dari keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan investasi publik secara produktif sesuai dengan prinsip syariat.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan keterkaitan antar unsur terkait dalam suatu penelitian. Keterkaitan itu menjadi pusat permasalahan yang ingin dieksplorasi. Riset ini bertumpu pada teori-teori yang pas dengan topik kajian.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Sumber: Diolah Peneliti (2025)

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Upaya Pajak (*Tax Effort*) terhadap Pendapatan Asli Daerah

Keterkaitan upaya perpajakan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah banyak dieksplorasi dengan hasil yang variatif. Sejumlah kajian menggambarkan upaya perpajakan memberi dampak positif pada PAD karena menunjukkan kapabilitas pemerintah daerah memaksimalkan potensi pajak yang tersedia (Ayu et al., 2024; Rahayu & Hendaris, 2025). Akan tetapi, penelitian lain menemukan upaya perpajakan tidak berdampak, malah negatif pada PAD, disebabkan efektivitas pengelolaan pajak daerah yang minim, semisal sistem administrasi lemah dan kepatuhan wajib pajak rendah (Alazhari et al., 2025; Frijunita et al., 2024)

Dari sudut *Stewardship Theory*, pemerintah daerah mempunyai kewajiban tata sumber daya publik secara maksimal, termasuk kekuasaan penerimaan pajak daerah sebagai sumber PAD (Donaldson & Davis, 1991). Di sisi lain, dari kerangka *Good Governance*, pemaksimalan pajak daerah gambarkan pengaturan keuangan yang transparan dan akuntabel (Mardiasmo, 2021). Secara kontekstual, semakin kuat upaya perpajakan, semakin besar peluang penerimaan pajak, sehingga potensi genjot PAD.

Meski begitu, keterkaitan itu sangat tergantung pada efektivitas sistem pengelolaan pajak daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Upaya Pajak (Tax Effort) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pedpaatan Asli Daerah..

2.2.4 Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah

Keterkaitan modal belanja dan PAD juga menghasilkan temuan beragam pada penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian menunjukkan modal belanja memberi dampak positif pada PAD karena mendorong aktivitas ekonomi dan kebutuhan dasar pajak daerah (Ariyanto & Masdjojo, 2025; Zein et al., 2024). Namun, penelitian lain menemukan modal belanja tidak signifikan pada PAD karena alokasinya belum penuh ke sektor produktif (Azzahra et al., 2023; Haptari et al., 2024).

Dari perspektif *Good Governance*, modal belanja wajib ditata efisien serta terfokus pada sektor produktif demi dampak ekonomi optimal (Mardiasmo, 2021). Sementara dari *Stewardship Theory*, belanja modal menggambarkan kewajiban pemerintah tingkatkan kesejahteraan melalui masyarakat pembangunan daerah (Donaldson & Davis, 1991). Secara kontekstual, modal belanja produktif akan merangsang aktivitas ekonomi, kebutuhan dasar pajak, serta genjot PAD. Tapi jika tidak optimal, efeknya pada peningkatan pendapatan daerah jadi tidak berarti. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Belanja Modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah..

2.4.2 Pengaruh Upaya Pajak (Tax Effort) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Studi sebelumnya menggambarkan keterkaitan upaya pajak (*Tax Effort*) dan kemandirian fiskal daerah masih inkonsisten. Sejumlah penelitian menunjukkan upaya pajak memberikan dampak positif pada kemandirian fiskal daerah karena kekuasaan penerimaan daerah (Riza &

Zuripal, 2023; Sudarwinti & Rusydi, 2025). Akan tetapi, penelitian lain menemukan upaya pajak tak langsung mempengaruhi kemandirian fiskal daerah karena tak selalu mengikuti penguatan PAD secara signifikan (Frijunita et al., 2024; Septiani et al., 2026) .

Dari *Stewardship Theory*, pemerintah daerah mempunyai kewajiban yang menguatkan kapasitas fiskal melalui pemaksimalan penerimaan pajak (Donaldson & Davis, 1991). Sementara *Good Governance*, pengelolaan pajak prima akan meningkatkan efektivitas fiskal daerah (Mardiasmo, 2021).

Secara kontekstual, penguatan potensi upaya pajak memperkuat kemandirian fiskal daerah, namun tidak selalu langsung karena andalkan penguatan PAD sebagai kebijakan *outcome*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Upaya Pajak (Tax Effort) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

2.4.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Keterkaitan belanja modal dan kemandirian keuangan daerah juga bervariasi pada studi terdahulu jumlah penelitian menemukan modal belanja berdampak positif pada kemandirian fiskal daerah melalui penguatan aktivitas ekonomi (Ariyanto & Masdjojo, 2025; Zein et al., 2024). Sebaliknya, penelitian lain mengindikasikan bahwa belanja modal tidak memberikan dampak signifikan atau justru bersifat negatif karena minimnya kontribusi langsung terhadap penerimaan daerah (Pramesti & Budi, 2025; Setiawan & Winarna, 2022).

Dari sudut pandang *Good Governance*, pengeluaran modal harus difokuskan pada sektor-sektor yang produktif untuk memperkuat daya saing fiskal daerah (Mardiasmo, 2021). Sementara itu, berdasarkan *Stewardship Theory*, belanja modal merepresentasikan komitmen pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan warga (Donaldson & Davis, 1991). Konseptualnya, belanja modal yang efektif mampu menguatkan kemandirian fiskal, tetapi pengelolaan yang kurang optimal

justru dapat membebani anggaran daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Belanja Modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

2.4.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Mayoritas penelitian empiris menegaskan adanya pengaruh positif PAD terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sebab PAD menjadi tolok ukur utama kapabilitas fiskal otonom (Haptari et al., 2024; Khairi et al., 2025). eskipun demikian, sebagian studi lain menyoroti bahwa rendahnya kontribusi PAD masih menghambat pencapaian kemandirian fiskal yang optimal (Yuliana & Usman, 2022).

Menurut *Stewardship Theory*, eskalasi PAD menandakan keberhasilan pengelolaan sumber daya publik oleh pemerintah daerah (Donaldson & Davis, 1991). Dari perspektif *Good Governance*, PAD mencerminkan standar pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel (Mardiasmo, 2021). Secara teoritis, semakin besar PAD yang dicapai, semakin tinggi kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan fiskalnya secara independen, yang pada gilirannya memperkuat kemandirian keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah..

2.4.5 Pendapatan Asli Daerah memediasi pengaruh (Upaya Pajak) *Tax Effort* terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Temuan riset sebelumnya mengindikasikan bahwa relasi antara tax effort dan kemandirian fiskal daerah bersifat tidak langsung, dengan PAD berfungsi sebagai mediator (Pramesti & Budi, 2025). Beberapa studi membuktikan bahwa *tax effort* memengaruhi PAD, yang selanjutnya berdampak pada kemandirian keuangan daerah, sehingga terbentuk efek tidak langsung (Khairi et al., 2025; Rahayu & Hendaris, 2025). Namun,

penelitian lain menyatakan bahwa *tax effort* tidak secara langsung meningkatkan kemandirian fiskal karena keterbatasan dalam menggenjot (Frijunita et al., 2024).

Dalam kerangka *Stewardship Theory*, pemerintah daerah bertanggung jawab mengubah potensi pajak menjadi realisasi PAD (Donaldson & Davis, 1991). Sementara dari sudut *Good Governance*, keberhasilan kebijakan perpajakan diukur dari capaian peningkatan PAD (Mardiasmo, 2018). Mekanismenya melibatkan proses di mana *tax effort* memperbesar penerimaan pajak, yang meningkatkan PAD, dan akhirnya menguatkan kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, PAD berperan sebagai variabel intervening yang menghubungkan *tax effort* dengan kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.:

H6: Pendapatan Asli Daerah memediasi pengaruh Upaya Pajak (Tax Effort) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

2.4.6 Pendapatan Asli Daerah memediasi pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Studi empiris terdahulu mengemukakan bahwa efek belanja modal terhadap kemandirian fiskal daerah bersifat mediasi melalui peningkatan PAD akibat multiplier ekonomi (Zein et al., 2024). Riset tertentu menemukan keterkaitan belanja modal dengan PAD, yang kemudian memengaruhi kemandirian keuangan daerah (Ariyanto & Masdjojo, 2025). Namun, studi lain menunjukkan bahwa belanja modal gagal secara signifikan mengerek PAD, sehingga tidak berdampak pada kemandirian fiska (Azzahra et al., 2023).

Perspektif *Good Governance* menekankan bahwa belanja modal harus menghasilkan nilai tambah ekonomi yang meningkatkan penerimaan daerah (Mardiasmo, 2021). Berdasarkan *Stewardship Theory*, alokasi modal mencerminkan amanah pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat (Donaldson & Davis, 1991). Secara kausal, belanja modal produktif merangsang aktivitas ekonomi, memperluas basis pajak, menguatkan PAD,

dan akhirnya meningkatkan kemandirian fiskal. Oleh karenanya, PAD menjadi variabel intervening dalam jalur kausalitas tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H7: Pendapatan Asli Daerah memediasi pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif verifikatif. Menurut (Sugiyono, 2023), pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis populasi atau sampel tertentu dalam rangka menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengolah data numerik yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) secara statistik, sehingga hubungan antar variabel dalam penelitian dapat diuji secara empiris.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari portal resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, khususnya Laporan Realisasi APBD, serta data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis pengaruh *tax effort* dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel mediasi.

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan jumlah yang telah ditetapkan, yang menjadi dasar dalam melakukan generalisasi hasil penelitian (Sugiyono., 2023). Dalam penelitian ini, populasi meliputi seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38 entitas, terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota, selama periode 2022–2024. Penetapan populasi secara spesifik berdasarkan wilayah dan periode penelitian tersebut penting untuk memastikan validitas serta relevansi hasil yang diperoleh.

3.3.2 Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling melalui pendekatan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2023), purposive sampling merupakan teknik pemilihan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu, sehingga data yang diperoleh dapat merepresentasikan tujuan penelitian secara lebih tepat.

3.4 Teknik Pengambilan Sampling

Teknik purposive sampling digunakan untuk menetapkan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, dengan tujuan memastikan kualitas data panel yang digunakan dalam penelitian. Meskipun populasi penelitian mencakup 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, pemilihan sampel dilakukan melalui beberapa kriteria seleksi sebagai berikut:

1. Kriteria wilayah, yaitu pemerintah kabupaten/kota yang berada dalam cakupan wilayah Provinsi Jawa Timur.
2. Kriteria ketersediaan data, yakni entitas yang secara konsisten menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) secara lengkap selama periode 2022–2024.
3. Kriteria variabel penelitian, yaitu laporan keuangan daerah yang memuat informasi rinci mengenai realisasi pajak daerah sebagai dasar perhitungan tax effort, realisasi belanja modal, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta total pendapatan daerah dan dana transfer sebagai dasar pengukuran rasio kemandirian fiskal.
4. Kriteria keabsahan data, yaitu penggunaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk menjamin akurasi data yang dianalisis menggunakan aplikasi Eviews.

Berdasarkan kriteria tersebut, didapatkan hasil seleksi kriteria sampel sebagai berikut:

Tabel 3 1
Distribusi Sampel

NO	KRITERIA	JUMLAH
1	Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	38
2	Kabupaten/Kota yang mempublikasikan LRA secara lengkap selama periode 2022-2024	38
3	Kabupaten/Kota yang memiliki data lengkap terkait PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)	38
4	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang digunakan adalah laporan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI	38
TOTAL		38
Total Observasi (38 Daerah x 3 Tahun)		114

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2025

Tabel 3 2
Sampel Terpilih

NO	KABUPATEN/KOTA
1	Kabupaten Bangkalan
2	Kabupaten Banyuwangi
3	Kabupaten Blitar
4	Kabupaten Bojonegoro
5	Kabupaten Bondowoso
6	Kabupaten Gresik
7	Kabupaten Jember
8	Kabupaten Jombang
9	Kabupaten Kediri
10	Kabupaten Lamongan
11	Kabupaten Lumajang
12	Kabupaten Madiun
13	Kabupaten Magetan
14	Kabupaten Malang
15	Kabupaten Mojokerto
16	Kabupaten Nganjuk
17	Kabupaten Ngawi
18	Kabupaten Pacitan

NO	KABUPATEN/KOTA
19	Kabupaten Pamekasan
20	Kabupaten Pasuruan
21	Kabupaten Ponorogo
22	Kabupaten Probolinggo
23	Kabupaten Sampang
24	Kabupaten Sidoarjo
25	Kabupaten Situbondo
26	Kabupaten Sumenep
27	Kabupaten Trenggalek
28	Kabupaten Tuban
29	Kabupaten Tulungagung
30	Kota Batu
31	Kota Blitar
32	Kota Kediri
33	Kota Madiun
34	Kota Malang
35	Kota Mojokerto
36	Kota Pasuruan
37	Kota Probolinggo
38	Kota Surabaya

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2025

3.5 Data dan Jenis Data

Studi ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data numerik yang diambil dari Laporan Realisasi APBD. Dokumen periodik tersebut tersedia di portal resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan untuk rentang waktu 2022–2024. Adapun data *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) atas dasar pendekatan pengeluaran kabupaten/kota bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan, mencatat, dan memproses data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Data diunduh dari situs resmi DJPK Kementerian Keuangan RI maupun portal pemerintah daerah terkait.

3.7 Variabel Oprasional

Variabel penelitian merujuk pada atribut, sifat, atau nilai dari subjek/objek yang memiliki variasi tertentu, yang ditetapkan untuk dianalisis dan digeneralisasi (Sugiyono, 2023). Variabel dalam studi ini diklasifikasikan menjadi dependen, independen, dan intervening sebagai berikut:

3.7.1. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah Kemandirian Keuangan Daerah, yang menggambarkan kapabilitas pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan operasional secara mandiri tanpa ketergantungan pada transfer pusat. Dengan pengukuran dengan rumus berikut ini:

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realiasi Pendapata Asli daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

3.7.2. Variabel Independen

Variabel independen adalah faktor penyebab yang memengaruhi variabel dependen (Sugiyono, 2023). Terdapat dua variabel independen dalam penelitian ini:

- a. *Tax effort* mengukur rasio realisasi penerimaan pajak terhadap potensi pajak daerah, mencerminkan efektivitas administrasi perpajakan dalam memaksimalkan basis pajak (Arif Hartono & Yeni Alvionita, 2021). Variabel ini mencerminkan sejauh mana kemampuan administrasi pemungutan pajak daerah dalam mengoptimalkan basis pajaknya. Dengan pengukuran dengan rumus berikut ini:

$$\text{Upaya Pajak (Tax Effort)} = \frac{\text{Realiasi Pajak Daerah}}{\text{PDRB}} \times 100\%$$

- b. Belanja modal mencakup pengeluaran untuk akuisisi aset tetap yang bermanfaat lebih dari satu periode akuntansi (Sugiyono, 2023). Pengukuran didasarkan pada realisasi belanja modal dalam LRA

kabupaten/kota Jawa Timur. Dengan pengukuran dengan rumus berikut ini:

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

3.7.3. Variabel Mediasi

Variabel intervening merupakan variabel yang berperan dalam memediasi hubungan kausal antara variabel independen dan dependen secara tidak langsung (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini, variabel intervening yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan daerah yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah (Zein et al., 2024). PAD berfungsi sebagai penghubung dalam menjelaskan pengaruh tax effort dan belanja modal terhadap kemandirian fiskal, di mana peningkatan kedua variabel independen tersebut diasumsikan terlebih dahulu akan meningkatkan PAD sebelum berdampak pada kemandirian keuangan daerah. Variabel ini diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{PAD yang sudah di tetapkan}} \times 100\%$$

Tabel 3 3
Definisi Operasional Variabel

NO	VARIABEL	DEFINISI	INDIKATOR	SUMBER
Variabel Dependen (Y)				
1	Kemandirian Keuangan Daerah	kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki	Kemandirian Keuangan Daerah : Realisasi PAD/Realisasi Pendapatan Transfer x100%	(Haptari et al., 2024), (Ishak, 2021), (Ariyanto & Masdjojo, 2025), (Pramesti & Budi, 2025)
Variabel Independen (X)				

NO	VARIABEL	DEFINISI	INDIKATOR	SUMBER
1	<i>Tax Effort</i>	rasio antara pendapatan pajak aktual dan kapasitas pajak, di mana kapasitas pajak merepresentasikan potensi pajak maksimum yang dapat diperoleh	$\text{Tax Effort} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah/PDRB}}{100\%}$	(Hartono & Alvionita, 2021), (Muhammad, 2021), (Amri et al., 2023), (Riza & Zuripal, 2023)
2	Belanja Modal	realisasi anggaran belanja pemerintah daerah yang dialokasikan untuk pembelian, pengadaan, atau pembangunan aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan	$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$	(Yuliana & Usman, 2022)
Variabel Z				
3	Pendapatan Asli Daerah	pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah	$\text{Persentase Pendapatan Asli Daerah:} \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah yang Ditetapkan}} \times 100\%$	(Situmorang et al., 2025), (Khairi et al., 2025)

Sumber :Data diolah Peneliti, 2025

3.8 Analisis Data

Analisis data bertujuan menyajikan informasi secara ringkas agar mudah diinterpretasikan. Penelitian ini menerapkan Regresi Data Panel untuk menguji pengaruh *tax effort* dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah, dengan PAD sebagai variabel intervening. Data panel mengintegrasikan dimensi

cross-section dan *time-series* (Napitupulu et al., 2021). Pengolahan dilakukan menggunakan *EViews 12* dan *Microsoft Excel*.

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk meringkas data tanpa generalisasi inferensial. Analisis ini menyajikan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan deviasi standar untuk variabel *tax effort*, belanja modal, PAD, serta kemandirian keuangan daerah (Napitupulu et al., 2021). Analisis ini dilakukan pada variabel *Tax Effort*, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Kemandirian Keuangan Daerah.

3.8.2 Analisis Pemilihan Model

Pemilihan model krusial untuk estimasi yang *unbiased*, *consistent*, dan *efficient*. Evaluasi dilakukan melalui uji statistik di *EViews* untuk menentukan model optimal (Napitupulu et al., 2021). Proses pemilihan model regresi data panel yang optimal akan melibatkan serangkaian uji statistik menggunakan *EViews*:

1. *Common Effect Model (CEM)* atau yang sering disebut *Pooled Least Squares (OLS)*, yaitu model yang mengasumsikan bahwa intercept dan slope bersifat sama untuk seluruh unit *cross-section* serta periode waktu, sehingga tidak mempertimbangkan adanya perbedaan atau heterogenitas antarindividu.
2. *Fixed Effect Model (FEM)*, yang mengatasi heterogenitas tidak teramati dengan memungkinkan setiap unit *cross-section* (misalnya, kabupaten/kota) memiliki intercept tersendiri, sehingga dapat menangkap efek spesifik individu yang konstan sepanjang waktu. Perbedaan antarindividu diakomodasi melalui *intercept* yang bervariasi.
3. *Random Effect Model (REM)*, yang menganggap efek spesifik individu sebagai variabel acak, dengan asumsi bahwa perbedaan individu terdistribusi secara acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen.

Tidak semua model prediksi data panel dapat diterapkan secara umum. Setiap daerah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang

beragam. Oleh karena itu, diperlukan pengujian untuk menentukan model regresi data panel yang paling sesuai. Menurut Napitupulu et al. (2021), terdapat tiga uji untuk memilih model terbaik:

1. *Uji Chow*: Digunakan untuk memilih antara model *Common Effect (CE)* dan *Fixed Effect (FE)*. Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka model *Fixed Effect* yang dipilih.
2. *Uji Hausman*: Digunakan untuk memilih antara model *Fixed Effect (FE)* dan *Random Effect (RE)*. Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka model *Fixed Effect* yang dipilih.
3. *Uji Lagrange Multiplier*: Digunakan untuk memilih antara model *Common Effect (CE)* dan *Random Effect (RE)* jika diperlukan.

3.8.3 Analisis Regresi Data Panel

Data panel merupakan penggabungan antara data *time series* dan *cross section*. Terdapat dua jenis data panel yaitu data panel *balance* dan data panel *unbalance*. Data panel *balance* adalah ketika setiap unit *cross sectional* memiliki jumlah observasi *time-series* yang sama (Napitupulu et al., 2021). Selain itu, analisis ini dilakukan untuk menilai apakah setiap variabel memiliki pengaruh positif atau negatif. Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Regresi Data Panel

Data panel merupakan penggabungan antara data *time series* dan *cross section*. Terdapat dua jenis data panel yaitu data panel *balance* dan data panel *unbalance*. Data panel *balance* adalah ketika setiap unit *cross sectional* memiliki jumlah observasi *time-series* yang sama (Napitupulu et al., 2021). Selain itu, analisis ini dilakukan untuk menilai apakah setiap variabel memiliki pengaruh positif atau negatif. Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sub-Struktural 1 (Model PAD):

$$Z = \alpha + \beta_1 TE + \beta_2 BM + \varepsilon$$

b. Sub-Struktural 2 (Model Kemandirian):

$$Y = \alpha + \beta_3 TE + \beta_4 BM + \beta_5 PAD + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Kemandirian Keuangan Daerah

Z : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

TE : *Tax Effort*

BM : Belanja Modal

ε : Residual (Error)

2. Regresi Data Panel Menggunakan Mediasi

Analisis mediasi dilakukan untuk menguji pengaruh variabel *intervening* (mediasi) dalam hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam analisis ini, variabel mediasi (PAD) berfungsi untuk mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara *Tax Effort* dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Pengujian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*) untuk mengidentifikasi pengaruh tidak langsung yang diberikan oleh variabel mediasi (Napitupulu et al., 2021).

3.8.4 Uji Asumsi Klasik

Untuk menghasilkan model regresi yang memenuhi *kriteria Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), diperlukan uji asumsi klasik terhadap model regresi data panel yang terpilih. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil estimasi parameter tidak bias dan memiliki varians minimum. Berdasarkan (Napitupulu et al., 2021), pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari:

3.8.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi residual normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan uji *Jarque-Bera* (J-B). Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada nilai

probabilitas statistik *Jarque-Bera*; jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka data residual terdistribusi normal (Napitupulu et al., 2021)..

3.8.4.2 Uji Multikolinieritas

3.8.4.3 *Uji multikolinieritas* dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi terdapat korelasi tinggi atau linearitas sempurna antar variabel independen (*Tax Effort* dan *Belanja Modal*). Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami korelasi signifikan antar variabel independen. Deteksi *multikolinieritas* dilihat dari nilai *Correlation Matrix* antar variabel. Jika koefisien korelasi antar variabel independen kurang dari 0,80 atau 0,90, maka model bebas dari masalah *multikolinieritas* serius (Napitupulu et al., 2021).

3.8.4.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual antar pengamatan. Jika varians residual konstan, disebut *homoskedastisitas*; jika bervariasi, disebut *heteroskedastisitas*. Model regresi ideal adalah *homoskedastis*. Pada data panel, uji dilakukan via *Glejser* atau *White*. Jika probabilitas $> 0,05$, maka tidak ada *heteroskedastisitas* (Napitupulu et al., 2021).

3.8.4.5 Uji Autokorelasi

Uji *autokorelasi* bertujuan menguji adanya korelasi antara error periode t dan $t-1$ pada model regresi linear. Masalah ini umum pada data *time-series*. Deteksi menggunakan *Durbin-Watson* (D-W). Model bebas autokorelasi jika nilai DW berada antara d_U dan $4-d_U$, atau mendekati 2 (Napitupulu et al., 2021).

3.8.5 Pengujian Hipotesis

3.8.5.1 Uji t (*t-test*, Uji Signifikansi Parsial)

Uji t dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menjelaskan variasi variabel dependen pada tingkat signifikansi 0,05 (Napitupulu et al., 2021). Apabila nilai probabilitas $< 0,05$, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara individual.

3.8.5.2 Uji F (*F-test*, Uji Signifikansi Simultan)

Uji F diterapkan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam model penelitian secara serempak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Napitupulu et al., 2021). Dalam kerangka analisis jalur, uji F dilakukan pada setiap persamaan struktural untuk memverifikasi bahwa model yang dibentuk sesuai dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Kriteria keputusan adalah jika probabilitas F-statistik $< 0,05$, maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga model dinyatakan layak (fit).

3.8.5.3 Koefisien Determinasi (*R-squared* dan *Adjusted R-squared*)

Koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol hingga satu. Karena model ini melibatkan lebih dari dua variabel independen, maka digunakan *Adjusted R-squared*, sebab nilai tersebut dapat berubah naik-turun ketika variabel independen tambahan dimasukkan ke model. Semakin mendekati satu nilai *Adjusted R-squared*, semakin baik kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Sebaliknya, jika mendekati nol, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat minim.

3.8.5.4 Pengujian Efek Mediasi (Uji Sobel)

Analisis jalur memerlukan pengujian khusus untuk membuktikan peran variabel *intervening*. Pengujian ini bertujuan menilai signifikansi

pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dari variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi (Pendapatan Asli Daerah). Pengujian menggunakan Uji Sobel yang membandingkan z-hitung dengan z-tabel. Mediasi dinyatakan signifikan jika z-hitung dari perkalian koefisien jalur melebihi 1,96 pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini membuktikan bahwa variabel mediasi secara signifikan menjadi perantara dalam hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Napitupulu et al., 2021).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran umum tentang distribusi data penelitian, mencakup nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), serta standar deviasi dari setiap variabel selama periode observasi 2022 hingga 2024.

Tabel 4.1
Analisis Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	Z
Mean	0.332571	0.376044	0.140529	1.027714
Median	0.249782	0.335961	0.132519	1.022406
Maximum	2.140834	1.069819	0.344636	1.701981
Minimum	0.121535	0.016579	0.062977	0.611504
Std. Dev.	0.329854	0.204700	0.053840	0.155817

Sumber: Diolah oleh EViews 2026

4.1.1.1 Upaya Pajak (Tax Effort)

Variabel Tax Effort atau upaya pajak dalam penelitian ini dihitung melalui rasio realisasi pajak daerah dibandingkan PDRB. Berdasarkan pengolahan data, variabel Tax Effort mencatat nilai minimum sebesar 0.016579 yang tercapai di Kota Kediri dan nilai maksimum sebesar 1.069819 pada Kota Batu. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0.376044 atau sekitar 37% mengindikasikan bahwa secara umum, kemampuan Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk memanfaatkan potensi pajak daerah relatif terhadap kapasitas ekonominya masih tergolong rendah. Standar deviasi sebesar 0.204700 yang lebih rendah dari mean menunjukkan bahwa data Tax Effort relatif homogen atau tidak menampilkan disparitas ekstrem antar daerah.

4.1.1.2 Belanja Modal

Variabel Belanja Modal dihitung menggunakan rasio belanja modal terhadap total belanja daerah. Hasil statistik deskriptif mengungkap nilai rata-rata belanja modal sebesar 0.140529 atau sekitar 14.05%. Nilai tertinggi sebesar 0.344636 yang dicapai pada Kota Tuban mencerminkan komitmen kuat daerah tersebut dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur fisik, sedangkan nilai terendah sebesar 0.062977 pada Kota Jember menggambarkan alokasi yang masih terbatas untuk belanja publik. Standar deviasi sebesar 0.053840 mengilustrasikan variasi kebijakan pengalokasian anggaran belanja modal antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

4.1.1.3 Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah yang diukur dengan rasio PAD terhadap Pendapatan Transfer memiliki nilai rata-rata sebesar 0.332571 atau sekitar 33%. Nilai tersebut menggambarkan bahwa secara rata-rata, tingkat kemandirian Kabupaten/Kota di Jawa Timur termasuk dalam kategori pola hubungan (partisipatif/delegatif) atau dapat dikatakan rendah. Nilai maksimum mencapai 2.140834 yang terjadi pada Kota Surabaya, menandakan tingkat kemandirian yang telah menguat, sementara nilai minimum sebesar 0.121535 pada Kabupaten Pacitan mencerminkan ketergantungan yang masih sangat besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Standar deviasi sebesar 0.329854 mengindikasikan adanya perbedaan tingkat kemandirian yang cukup mencolok antar satu Kabupaten/Kota dengan yang lain.

4.1.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Sebagai variabel mediasi, PAD merepresentasikan kekuatan fiskal internal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diukur menggunakan rasio antara PAD yang ditetapkan dengan realisasi

PAD pada daerah tersebut. Berdasarkan data penelitian, PAD memiliki nilai rata-rata sebesar 1.027714. Nilai maksimum yang cukup tinggi sebesar 1.701981 yang tercatat pada Kabupaten Trenggalek menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD melebihi target yang ditetapkan daerah tersebut. Sebaliknya, nilai minimum sebesar 0.611504 pada Kota Malang mengindikasikan kinerja yang kurang optimal karena jauh dari anggaran PAD yang telah ditetapkan. Nilai standar deviasi sebesar 0.155817 menandakan bahwa persebaran PAD di Jawa Timur menunjukkan tingkat variabilitas yang cukup tinggi antar daerah.

4.1.2 Analisis Pemilihan Model

Penentuan model estimasi regresi data panel dilakukan untuk memilih model yang paling sesuai antara *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, atau *Random Effect Model (REM)*. Pengujian dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu *Uji Chow*, *Uji Hausman*, dan *Uji Lagrange Multiplier*.

4.1.2.1 Uji Model Sub-Struktural 1

Penentuan model estimasi regresi data panel pada sub-struktural 1 dilakukan untuk menetapkan model yang paling objektif dalam menjelaskan pengaruh *Tax Effort* dan Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahapan pengujian dilakukan sebagai berikut::

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model yang lebih tepat adalah *Common Effect Model (CEM)* atau *Fixed Effect Model (FEM)*. Kriteria pengujian adalah jika nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* $< 0,05$, maka model FEM lebih tepat digunakan dan jika *Cross-section Chi-square* $> 0,05$ maka model CEM lebih tepat digunakan.

Tabel 4.2
Hasil Uji Clow Sub 1

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.780707	(37,74)	0.0178
Cross-section Chi-square	72.591075	37	0.0004

Sumber: Diolah oleh EViews 2026

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, diperoleh nilai probabilitas untuk *Cross-section Chi-square* sebesar 0,0004. Karena nilai probabilitas $0,0004 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam Uji Chow ini, *Fixed Effect Model (FEM)* lebih tepat digunakan dibandingkan *Common Effect Model (CEM)*.

2. Uji Housman

Setelah model FEM terpilih melalui Uji Chow, langkah selanjutnya adalah melakukan Uji Hausman untuk membandingkan antara model *Fixed Effect Model (FEM)* dengan *Random Effect Model (REM)*. Kriteria pengujiannya adalah jika nilai probabilitas Cross-section Random $> 0,05$, maka model REM lebih tepat digunakan dan jika Cross-section Random $< 0,05$ maka FEM lebih tepat digunakan.

Tabel 4.3
Hasil Uji Housman Sub 1

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.093807	2	0.0783

Sumber: Diolah oleh EViews 2026

Berdasarkan hasil output Eviews pada tabel di atas, diperoleh nilai probabilitas Cross-section Random sebesar 0,0783. Karena nilai probabilitas $0,0783 > 0,05$, maka H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Random Effect Model (REM) lebih tepat digunakan dibandingkan Fixed Effect Model (FEM).

4. Uji Lagrange Multiplier

Berdasarkan hasil *Uji Chow memilih FEM dan Uji Hausman memilih REM*, maka dilakukan *Uji Lagrange Multiplier (LM)* untuk memastikan apakah model *Random Effect Model (REM)* memang lebih baik daripada *Common Effect Model (CEM)*. Kriteria pengujiannya adalah jika nilai probabilitas *Cross-section Random* $> 0,05$, maka model CEM lebih tepat digunakan dan jika *Cross-section Random* $< 0,05$ maka REM lebih tepat digunakan.

Tabel 4.4
Hasil Uji Lagrange Multiplier Sub 1

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	2.699247 (0.1004)	7.033100 (0.0080)	9.732347 (0.0018)

Sumber: Diolah oleh EViews 2026

Berdasarkan hasil pengujian LM, diperoleh nilai probabilitas (Breusch-Pagan) sebesar 0,1004. Karena nilai probabilitas $0,1004 > 0,05$, maka H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *Common Effect Model (CEM)* lebih

tepat dan efisien untuk digunakan dalam mengestimasi model penelitian pada sub-struktural 1 dibandingkan model REM.

4.1.2.2 Uji Model Sub-Struktural 2

Pemilihan model estimasi regresi data panel pada sub-struktural 2 dilakukan untuk menentukan model yang paling objektif dalam menjelaskan pengaruh *Tax Effort*, Belanja Modal, dan PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Tahapan pengujian dilakukan sebagai berikut:

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model yang lebih tepat digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Kriteria pengujian adalah jika nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* $< 0,05$, maka model FEM lebih tepat digunakan dan jika *Cross-section Chi-square* $> 0,05$ maka model CEM lebih tepat digunakan.

Tabel 4.5
Hasil Uji Chow Sub 2

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	478.513783	(37,73)	0.0000
Cross-section Chi-square	626.459428	37	0.0000

Sumber: Diolah oleh EViews 2026

Berdasarkan hasil output Eviews pada Tabel [Nomor Tabel], diperoleh nilai probabilitas pada *Cross-section Chi-square* sebesar 0,0000. Karena nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) lebih tepat

digunakan untuk mengestimasi data penelitian pada sub-struktural 2 dibandingkan dengan model CEM.

2. Uji Housman

Setelah model FEM terpilih melalui Uji Chow, langkah selanjutnya adalah melakukan Uji Hausman untuk membandingkan antara model *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *Random Effect Model* (REM). Kriteria pengujiannya adalah jika nilai probabilitas *Cross-section Random* $> 0,05$, maka model REM lebih tepat digunakan dan jika *Cross-section Random* $< 0,05$ maka CEM lebih tepat digunakan.

Tabel 4.6
Hasil Uji Housman Sub 2

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.712737	3	0.0334

Sumber: Diolah oleh EViews 2026

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel [Nomor Tabel], diperoleh nilai probabilitas *Cross-section Random* sebesar 0,0334. Karena nilai probabilitas $0,0334 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, hasil Uji Hausman memperkuat keputusan bahwa model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

3. Uji LM (*Lagrange Multiplier*)

Dalam prosedur pemilihan model regresi data panel, apabila hasil Uji Chow dan Uji Hausman sudah secara konsisten memilih *Fixed Effect Model* (FEM) sebagai model terbaik, maka Uji *Lagrange Multiplier* (LM) tidak wajib lagi untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan Uji LM berfungsi untuk memilih antara CEM dan REM, sementara hasil pengujian sebelumnya telah membuktikan bahwa model FEM memiliki

tingkat akurasi yang lebih tinggi untuk data sub-struktural 2 ini dibandingkan model lainnya.

4.1.3 Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel dalam penelitian ini digunakan untuk mengestimasi hubungan antar variabel dengan mempertimbangkan dimensi waktu dan ruang. Berdasarkan hasil uji pemilihan model yang telah dilakukan sebelumnya, model yang terpilih untuk Sub-Struktural 1 adalah *Common Effect Model* (CEM), sedangkan untuk Sub-Struktural 2 adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Sesuai dengan referensi Napitupulu et al. (2021), kedua model ini (CEM dan FEM) diestimasi menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS). Penggunaan pendekatan OLS mengharuskan model memenuhi asumsi klasik agar menghasilkan parameter yang bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Namun, pada data panel, pengujian asumsi klasik dilakukan secara spesifik dengan pertimbangan sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Analisis Regresi Data Panel Sub 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.072842	0.046511	23.06656	0.0000
X1	-0.166253	0.070791	-2.348501	0.0206
X2	0.123747	0.269149	0.459773	0.6466

Sumber: Diolah oleh EViews 2026

Berdasarkan tabel di atas maka persamaan regresi data panel digambarkan sebagai berikut:

$$PAD = 1,0728 - 0,1662 + 0,1237 + 0,9757$$

Nilai konstanta sebesar 1,0728 menunjukkan bahwa apabila variabel *Tax Effort* dan Belanja Modal berada dalam kondisi tetap atau nol, maka nilai PAD diprediksi tetap sebesar 1,0728 satuan. Model ini memiliki nilai *R-squared* sebesar 0,047839, yang berarti variabel independen dalam model hanya mampu menjelaskan variasi PAD sebesar 4,78%. Dari nilai tersebut, dapat dihitung nilai residual error melalui rumus $\sqrt{(1 - R^2)}$, sehingga diperoleh hasil sebesar 0,9757. Angka residual yang

tinggi ini (95,22%) mengindikasikan bahwa terdapat banyak faktor lain di luar model penelitian, seperti kondisi makroekonomi daerah atau kebijakan fiskal pusat, yang memiliki pengaruh lebih dominan terhadap fluktuasi PAD di lokasi penelitian.

Secara parsial, variabel *Tax Effort* (TE) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,1662 dengan tingkat signifikansi 0,0206. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa Tax Effort berpengaruh signifikan namun memiliki arah negatif terhadap PAD. Temuan ini memberikan gambaran bahwa upaya peningkatan pajak daerah yang dilakukan belum berbanding lurus dengan peningkatan realisasi PAD, yang secara teoritis dapat disebabkan oleh rendahnya elastisitas pajak terhadap pertumbuhan ekonomi atau adanya inefisiensi dalam sistem pemungutan di daerah tersebut. Di sisi lain, variabel Belanja Modal (BM) menghasilkan koefisien sebesar 0,1237 dengan nilai signifikansi 0,6466. Mengingat nilai signifikansi tersebut jauh di atas 0,05, maka Belanja Modal dinyatakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk pembangunan aset tetap belum memberikan dampak peningkatan pendapatan daerah secara instan dalam periode pengamatan, mengingat investasi modal biasanya memerlukan waktu (*time lag*) yang cukup lama untuk memberikan timbal balik ekonomi terhadap penerimaan daerah.

Tabel 4.8
Hasil Analisis Regresi Data Panel Sub 2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.247176	0.100361	-12.42689	0.0000
X1	0.102100	0.227015	0.449750	0.6542
X2	-0.737912	0.297362	-2.481525	0.0154
Z	0.507690	0.091048	5.576042	0.0000

Sumber: Diolah oleh EViews 2026

Berdasarkan tabel di atas maka persamaan regresi data panel digambarkan sebagai berikut:

$$\text{KKD: } -1,2471 + 0,1021 - 0,7379 + 0,5076 + 0,6422$$

Nilai konstanta sebesar -1,2471 mengindikasikan bahwa tanpa adanya kontribusi dari ketiga variabel tersebut, tingkat kemandirian daerah cenderung berada pada angka negatif atau sangat rendah. Model ini memiliki nilai R-squared sebesar 0,5876, yang menunjukkan bahwa variasi Kemandirian Keuangan Daerah mampu dijelaskan oleh variabel TE, BM, dan PAD sebesar 58,76%. Dari nilai tersebut, diperoleh nilai residual error sebesar 0,6422 (hasil dari $\sqrt{(1 - 0,5876)}$), yang berarti terdapat 41,24% faktor lain di luar model penelitian yang turut mempengaruhi kemandirian fiskal daerah.

Secara parsial, variabel *Tax Effort* (TE) memiliki koefisien sebesar 0,1021 dengan nilai signifikansi 0,6542. Karena nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05, maka *Tax Effort* secara langsung tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pajak saja tidak cukup untuk meningkatkan kemandirian tanpa melalui optimalisasi realisasi PAD terlebih dahulu. Sementara itu, variabel Belanja Modal (BM) secara mengejutkan memiliki pengaruh signifikan namun bersifat negatif dengan koefisien -0,7379 dan signifikansi 0,0154. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan belanja modal yang tidak efisien atau tidak tepat sasaran justru dapat membebani anggaran daerah dan menurunkan rasio kemandirian keuangan. Di sisi lain, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pengaruh positif yang sangat dominan dengan koefisien 0,5076 dan signifikansi 0,0000. Temuan ini menegaskan bahwa PAD merupakan faktor kunci dan penentu utama dalam meningkatkan kemandirian daerah, di mana semakin tinggi PAD yang berhasil dihimpun, maka ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat akan semakin berkurang .

1. Uji Multikolinearitas

Uji *multikolinieritas* bertujuan untuk memastikan tidak terdapat korelasi linear yang sempurna atau sangat kuat antar variabel independen dalam model regresi. Berdasarkan (Napitupulu et al., 2021), kriteria pengujian adalah nilai korelasi antar variabel harus $< 0,80$.

Tabel 4 9**Hasil Uji Multikolinieritas**

	X1	X2	Z
X1	1	0.09060193397639992	-0.2145368248782558
X2	0.09060193397639992	1	0.02297047546122891
Z	-0.2145368248782558	0.02297047546122891	1

Sumber: Diolah oleh EViews 2026

Pada Hasil uji menunjukkan nilai korelasi antara Tax Effort (X1) dan Belanja Modal (X2) sebesar 0,0906. Karena $0,0906 < 0,80$, maka model Sub 1 bebas dari multikolinieritas. Selanjutnya hasil uji menunjukkan seluruh nilai korelasi antar variabel Tax Effort (X1), Belanja Modal (X2) dan Pendapatan Asli Daerah (Z) hasilnya sebesar 0,0906 dan $-0,2145 < 0,05$. Dengan demikian, model Sub 2 juga dinyatakan lolos uji multikolinieritas.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi apakah varians dari residual dalam model bersifat tidak konstan. Mengingat data penelitian terdiri dari 38 Kabupaten/Kota dengan karakteristik ekonomi yang beragam, potensi heteroskedastisitas sangat besar. Pengujian dilakukan di mana model dikatakan bebas heteroskedastisitas jika nilai probabilitas $> 0,05$ (Napitupulu et al., 2021)

Tabel 4.9
Hasil Uji Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.077358	0.032045	2.414047	0.0174
X1	-0.022539	0.048774	-0.462105	0.6449
X2	0.282784	0.185439	1.524941	0.1301

Sumber: Diolah oleh EViews 2026

Pada Sub-Struktural 1 nilai probabilitas X1 (0,6449) dan X2 (0,1301) semuanya $> 0,05$. Maka, model Sub 1 terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4 9
Hasil Uji Heterokedastisitas sub 2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.021247	0.043639	0.486885	0.6278
X1	0.069331	0.098711	0.702361	0.4847
X2	0.079520	0.129299	0.615005	0.5405
Z	0.019594	0.039590	0.494915	0.6221

Sumber: Diolah oleh EViews 2026

Sub-Struktural 2 Nilai probabilitas X1 (0,0641), X2 (0,3593), dan Z (0,1882) semuanya $> 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pada model Sub 2 terbebas dari heterokedastisitas.

4.1.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk memverifikasi secara ilmiah apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, baik pada model mediasi (Sub-Struktural 1) maupun model utama (Sub-Struktural 2). Kriteria pengujian didasarkan pada nilai probabilitas (sig) dengan taraf $< 5\%$ (0,05)

4.1.4.1 Uji T

Uji t dilakukan untuk membuktikan keberartian pengaruh variabel Tax Effort dan Belanja Modal terhadap variabel mediasi (PAD), serta pengaruh seluruh variabel tersebut terhadap Kemandirian Keuangan Daerah secara individu. Dengan uji ini, peneliti dapat memastikan apakah hubungan yang ditemukan dalam model regresi data panel bersifat stabil dan dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Hasil Uji T sebagai berikut:

1. Sub-Struktural 1

Tabel 4 9
Hasil Uji T Sub 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.072842	0.046511	23.06656	0.0000
X1	-0.166253	0.070791	-2.348501	0.0206
X2	0.123747	0.269149	0.459773	0.6466

Sumber: Diolah oleh EViews 2026

Berdasarkan hasil diatas nilai probabilitas variabel *Tax Effort* (X1) menunjukkan angka 0,0206. Karena nilai probabilitas $0,0206 < 0,05$, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, Tax Effort berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Koefisien regresi sebesar -0,1662 mengindikasikan adanya pengaruh negatif, yang berarti setiap peningkatan unit *Tax Effort* justru cenderung diikuti oleh penurunan PAD pada sampel ini.

Pada nilai probabilitas variabel Belanja Modal (X2) menunjukkan angka 0,6466. Karena nilai probabilitas $0,6466 > 0,05$, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama periode penelitian.

2. Sub-Struktural 2

Tabel 4 9
Hasil Uji T Sub 2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.247176	0.100361	-12.42689	0.0000
X1	0.102100	0.227015	0.449750	0.6542
X2	-0.737912	0.297362	-2.481525	0.0154
Z	0.507690	0.091048	5.576042	0.0000

Sumber: Diolah oleh EViews 2026

Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas Pengaruh *Tax Effort* (X1) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) Nilai probabilitas variabel *Tax Effort* (X1) menunjukkan angka 0,6542. Karena nilai probabilitas $0,6542 >$

0,05, maka H_0 diterima dan ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, Tax Effort tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Pada variabel Belanja Modal (X_2) nilai probabilitas menunjukkan angka 0,0154. Karena nilai probabilitas $0,0154 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Koefisien regresi sebesar -0,7379 menunjukkan pengaruh negatif, yang berarti alokasi belanja modal yang lebih tinggi berhubungan dengan penurunan rasio kemandirian keuangan pada model ini.

Hasil dari nilai probabilitas variabel PAD (Z) menunjukkan angka 0,0000. Karena nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Koefisien regresi sebesar 0,5076 menunjukkan bahwa setiap kenaikan PAD akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah secara signifikan.

4.1.4.2 Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen dalam model penelitian secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai probabilitas (F-statistik) dengan tingkat signifikansi = 0,05 (5%). Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka model penelitian dinyatakan layak (fit) dan variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

1. Sub-Struktural 1

Tabel 4 9
Hasil Uji F Sub 1

R-squared	0.047839
Adjusted R-squared	0.030683
S.E. of regression	0.153408
Sum squared resid	2.612261
Log likelihood	53.47200
F-statistic	2.788484
Prob(F-statistic)	0.065829

Sumber: Diolah oleh EViews 2026

Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa nilai probabilitas F-statistik adalah sebesar 0,065829 . Karena nilai $0,065829 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan, *Tax Effort* dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Z). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi sub-struktural 1 memenuhi kriteria kelayakan model (goodness of fit) untuk digunakan dalam penelitian ini.

2. Sub-Struktural 2

Tabel 4 9
Hasil Uji F Sub 2

R-squared	0.978974
Adjusted R-squared	0.967453
S.E. of regression	0.098024
Sum squared resid	0.701429
Log likelihood	128.4185
F-statistic	84.97336
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Diolah oleh EViews 2026

Berdasarkan hasil output, nilai probabilitas F-statistik menunjukkan angka sebesar 0,000000. Oleh karena nilai $0,000000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel *Tax Effort*, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y). Dengan demikian, model sub-struktural 2 dinyatakan layak untuk menjelaskan variasi pada variabel Kemandirian Keuangan Daerah.

4.1.4.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini, nilai yang digunakan adalah Adjusted R-squared karena nilainya lebih stabil dan tidak terpengaruh oleh penambahan jumlah variabel independen ke dalam model.

1. Sub-Struktural 1

Berdasarkan hasil regresi pada sub-struktural 1, diperoleh nilai Adjusted R-squared sebesar 0,030683. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan oleh variabel Tax Effort dan Belanja Modal sebesar 3%, sedangkan sisanya sebesar 97% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

2. Sub Struktural 2

Berdasarkan hasil regresi pada Persamaan 2, diperoleh nilai Adjusted R-squared sebesar 0.967453. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 96% variasi pada variabel Kemandirian Keuangan Daerah dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh Tax Effort, Belanja Modal, dan PAD. Selebihnya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar lingkup penelitian.

4.1.5 Hasil Uji Sobel

Uji Sobel digunakan untuk menguji apakah hubungan yang terjadi antara variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening bersifat signifikan secara statistik. Dalam penelitian ini, Uji Sobel dilakukan untuk melihat kekuatan pengaruh tidak langsung Tax Effort (X1) dan Belanja Modal (X2) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) melalui Pendapatan Asli Daerah (Z).

Gambar 4.1
Uji Sobel Sub

Input:		Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a	-0.166253	Sobel test: -2.16436983	0.03899749	0.03043598
b	0.507690	Aroian test: -2.13540059	0.03952653	0.0327283
s _a	0.070791	Goodman test: -2.194551	0.03846116	0.02819582
s _b	0.091048	Reset all	Calculate	

Sumber: Diolah oleh EViews 2026

Berdasarkan hasil kalkulasi Uji Sobel yang dilakukan pada variabel tax effort, diperoleh nilai test statistic sebesar -2,164 dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,0304. Oleh karena nilai probabilitas $0,0304 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (Z) mampu memediasi pengaruh Tax Effort (X1) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y). Hal ini menunjukkan bahwa Tax Effort tidak hanya memberikan dampak secara langsung, namun memiliki pengaruh yang signifikan melalui penguatan PAD terlebih dahulu sebelum akhirnya memengaruhi tingkat kemandirian keuangan di Jawa Timur.

Gambar 4.1
Uji Sobel Sub 2

Input:		Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a	0.123747	Sobel test: 0.45821635	0.13710797	0.64679701
b	0.507690	Aroian test: 0.45106833	0.1392807	0.6519403
s _a	0.269149	Goodman test: 0.46571533	0.13490025	0.64141928
s _b	0.091048	Reset all	Calculate	

Sumber: Diolah oleh EViews 2026

Berdasarkan hasil kalkulasi Uji Sobel untuk belanja modal, diperoleh nilai test statistic sebesar 0,4582 dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,6467. Oleh karena nilai probabilitas $0,6467 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (Z) tidak mampu memediasi pengaruh Belanja Modal (X2) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y). Artinya, alokasi Belanja

Modal yang dikeluarkan pemerintah daerah tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan jika hanya mengandalkan jalur peningkatan PAD.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Tax Effort Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *tax effort* berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun dengan arah negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan upaya pemungutan pajak daerah tidak selalu diikuti oleh peningkatan penerimaan daerah, bahkan dalam kondisi tertentu justru berpotensi menurunkan PAD. Fenomena ini menunjukkan bahwa intensitas pemungutan pajak bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan peningkatan pendapatan daerah, melainkan sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem administrasi perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta kualitas tata kelola fiskal daerah.

Dalam perspektif *Stewardship Theory*, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola potensi pajak secara optimal sebagai bentuk amanah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan *tax effort* belum diimbangi dengan efektivitas pengelolaan, sehingga belum mampu menghasilkan peningkatan PAD secara optimal. Sementara itu, dalam perspektif *Good Governance*, pengelolaan pajak daerah yang efektif seharusnya mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Apabila prinsip-prinsip tersebut belum diterapkan secara optimal, maka peningkatan *tax effort* tidak akan memberikan hasil yang diharapkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Frijunita et al., 2024) dan (Alazhari et al., 2025) yang menunjukkan bahwa *tax effort* tidak selalu memberikan dampak positif terhadap PAD apabila tidak didukung oleh sistem pengelolaan yang efektif. Namun demikian, hasil ini berbeda dengan penelitian (Rahayu & Hendaris, 2025) serta (Ayu et al., 2024) yang menemukan bahwa optimalisasi

pajak daerah mampu meningkatkan PAD apabila dikelola dengan baik. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas *tax effort* sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola serta karakteristik masing-masing daerah.

Dalam perspektif Islam, optimalisasi *tax effort* merupakan bagian dari amanah pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 261 yang menggambarkan bahwa setiap usaha yang dilakukan secara tepat dan produktif akan menghasilkan manfaat yang berlipat ganda. Dalam konteks ini, *tax effort* dapat dianalogikan sebagai upaya awal dalam menghimpun potensi pendapatan daerah. Namun, apabila tidak diiringi dengan pengelolaan yang efektif dan amanah, maka hasil yang diperoleh tidak akan optimal. Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa suatu usaha akan berkembang dan memberikan hasil maksimal apabila dilakukan secara tepat sasaran, sehingga ketidakefektifan pengelolaan pajak dapat menyebabkan hasil yang tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki.

4.2.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi belanja modal belum mampu secara langsung meningkatkan pendapatan daerah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh belanja modal memberikan dampak ekonomi yang produktif, terutama apabila tidak diarahkan pada sektor yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru.

Dalam perspektif *Good Governance*, belanja modal seharusnya menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kapasitas ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Namun, apabila perencanaan dan pelaksanaannya tidak optimal, maka belanja tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Sementara itu, dalam perspektif *Stewardship Theory*, pemerintah daerah seharusnya mampu mengelola belanja publik secara efektif guna menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Azzahra et al., 2023) dan (Haptari et al., 2024) yang menunjukkan bahwa belanja modal tidak selalu berpengaruh terhadap PAD, karena alokasi yang tidak tepat sasaran atau tidak diarahkan pada sektor produktif cenderung hanya meningkatkan pengeluaran tanpa menghasilkan aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan penerimaan daerah. Namun demikian, hasil ini berbeda dengan penelitian (Ariyanto & Masdjojo, 2025) serta (Zein et al., 2024) yang menemukan bahwa belanja modal dapat meningkatkan PAD apabila dialokasikan pada sektor produktif. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas belanja modal sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan dan implementasinya, di mana belanja yang tepat sasaran mampu menciptakan multiplier effect melalui peningkatan aktivitas ekonomi, memperluas basis pajak dan retribusi, serta pada akhirnya meningkatkan PAD secara berkelanjutan.

Dalam perspektif Islam, belanja modal merupakan bentuk pengelolaan sumber daya yang harus diarahkan pada kegiatan produktif yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 261 yang mengilustrasikan bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan pada jalan yang tepat akan berkembang dan menghasilkan manfaat yang berlipat ganda. Dalam konteks ini, belanja modal dapat dianalogikan sebagai “benih” yang ditanam oleh pemerintah daerah. Namun, apabila tidak diarahkan pada sektor produktif, maka tidak akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan PAD. Tafsir Al-Misbah menegaskan bahwa hasil yang optimal hanya dapat dicapai apabila suatu tindakan dilakukan secara tepat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

4.2.3 Pengaruh Tax Effort Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax effort* tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan upaya pemungutan pajak daerah tidak secara langsung meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya secara mandiri. Dengan kata lain, intensitas kebijakan fiskal dalam bentuk *tax effort*

belum mampu menghasilkan dampak nyata terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Dalam perspektif teori, *tax effort* seharusnya berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak terjadi secara langsung, karena kemandirian keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya upaya pemungutan pajak, tetapi lebih pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengkonversi potensi pajak menjadi pendapatan riil dalam bentuk PAD. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya peningkatan PAD, *tax effort* tidak memiliki dampak signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah. Secara mekanisme, kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya efektivitas administrasi perpajakan daerah, tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam mengelola potensi pajak daerah. Akibatnya, meskipun upaya pemungutan pajak meningkat, hasil yang diperoleh belum mampu meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Frijunita et al., 2024) dan (Riza & Zuripal, 2023) yang menunjukkan bahwa *tax effort* tidak berpengaruh langsung terhadap kemandirian keuangan daerah, karena peningkatan upaya pemungutan pajak belum tentu mampu meningkatkan kapasitas fiskal apabila tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan riil daerah. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian (Septiani et al., 2026) yang menemukan adanya pengaruh positif, yang menunjukkan bahwa efektivitas *tax effort* sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan pajak daerah, seperti sistem administrasi yang baik, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pajak. Dengan demikian, perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa *tax effort* tidak secara otomatis meningkatkan kemandirian keuangan daerah, melainkan bergantung pada sejauh mana upaya tersebut mampu dikonversi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan daerah.

Dalam perspektif Islam, pengelolaan keuangan daerah merupakan amanah yang harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 261 yang menegaskan bahwa setiap usaha yang dilakukan secara tepat dan produktif akan menghasilkan manfaat yang berlipat. Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa suatu usaha akan memberikan hasil optimal apabila dikelola secara efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, tidak signifikannya pengaruh tax effort menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum diiringi dengan pengelolaan yang optimal, sehingga belum mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah secara berkelanjutan.

4.2.4 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dengan arah negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja modal justru diikuti oleh penurunan tingkat kemandirian keuangan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa belanja modal yang dilakukan belum mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Dalam perspektif *Good Governance*, belanja modal seharusnya dialokasikan secara efisien dan produktif untuk mendorong aktivitas ekonomi serta memperluas basis penerimaan daerah. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal yang dilakukan belum sepenuhnya menghasilkan output ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan daerah. Secara mekanisme, belanja modal yang tidak produktif cenderung hanya meningkatkan pengeluaran tanpa diimbangi dengan peningkatan pendapatan, sehingga justru memperbesar ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini dapat terjadi apabila alokasi belanja tidak difokuskan pada sektor yang mampu menciptakan *multiplier effect*, seperti infrastruktur produktif atau sektor ekonomi strategis.

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Azzahra et al., 2023) yang menunjukkan bahwa belanja modal dapat berdampak negatif terhadap kemandirian keuangan daerah apabila tidak dikelola secara produktif, karena hanya meningkatkan beban

pengeluaran tanpa menghasilkan peningkatan pendapatan sehingga memperbesar ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Namun demikian, hasil ini berbeda dengan penelitian (Ariyanto & Masdjojo, 2025) yang menemukan bahwa belanja modal dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah apabila dikelola secara optimal dan diarahkan pada sektor produktif. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas belanja modal sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan dan implementasi kebijakan, di mana belanja yang tepat sasaran mampu menciptakan multiplier effect melalui peningkatan aktivitas ekonomi, memperluas basis pajak dan retribusi, serta meningkatkan PAD yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dalam perspektif Islam, setiap pengeluaran harus memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 261 yang mengajarkan bahwa pengeluaran yang tepat akan menghasilkan manfaat yang berlipat. Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa suatu tindakan akan memberikan hasil yang optimal apabila dilakukan secara tepat sasaran. Dengan demikian, pengaruh negatif belanja modal menunjukkan bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan dan produktivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

4.2.5 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD secara langsung meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya secara mandiri serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Dalam perspektif teori, PAD merupakan indikator utama dalam mengukur kemandirian fiskal daerah karena mencerminkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan dari sumber internal. Semakin tinggi PAD, maka semakin besar fleksibilitas daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri. Secara mekanisme, peningkatan PAD akan memperkuat kapasitas fiskal daerah,

sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih besar dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik tanpa bergantung pada dana eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa PAD merupakan faktor kunci dalam menentukan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan (Khairi et al., 2025) dan (Haptari et al., 2024) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Temuan tersebut menegaskan bahwa PAD merupakan komponen utama dalam membentuk kapasitas fiskal daerah karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari sumber internal tanpa ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri, sehingga meningkatkan fleksibilitas dalam pengambilan kebijakan fiskal sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan demikian, konsistensi hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak hanya berfungsi sebagai indikator kinerja fiskal, tetapi juga sebagai faktor strategis dalam menentukan tingkat kemandirian keuangan daerah secara berkelanjutan.

Dalam perspektif Islam, peningkatan PAD mencerminkan keberhasilan dalam mengelola sumber daya secara amanah dan produktif. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 261 yang menegaskan bahwa hasil yang optimal merupakan konsekuensi dari pengelolaan yang baik. Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa hasil yang berkembang menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya secara tepat. Dengan demikian, peningkatan PAD mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan amanah pengelolaan keuangan secara bertanggung jawab.

4.2.6 Pengaruh Tax Effort Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD mampu memediasi pengaruh tax effort terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa

tax effort tidak berpengaruh secara langsung terhadap kemandirian keuangan daerah, melainkan melalui peningkatan PAD sebagai hasil nyata dari kebijakan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak ditentukan oleh besarnya upaya pemungutan pajak, tetapi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengkonversi upaya tersebut menjadi pendapatan riil daerah.

Secara empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tax effort* berpengaruh terhadap PAD, dan PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa *peningkatan tax effort* dapat mendorong peningkatan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah (Alazhari et al., 2025). Di sisi lain, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah karena mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri (Haptari et al., 2024; Khairi et al., 2025). Dengan demikian, hubungan tidak langsung antara *tax effort* dan kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan melalui peran PAD sebagai variabel *intervening*.

Secara teoritis, dalam perspektif *Stewardship Theory*, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola potensi pajak menjadi sumber pendapatan yang optimal bagi daerah. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa peningkatan PAD, *tax effort* tidak mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah secara langsung. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya diukur dari besarnya upaya yang dilakukan, tetapi juga dari hasil yang dicapai dalam bentuk pendapatan daerah yang nyata.

Dalam perspektif Islam, suatu usaha akan menghasilkan manfaat yang optimal apabila melalui proses pengelolaan yang tepat. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 261 yang menegaskan bahwa hasil yang berlipat merupakan konsekuensi dari proses yang benar. Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa suatu usaha akan berkembang apabila melalui tahapan yang tepat, sehingga PAD

sebagai variabel perantara mencerminkan keberhasilan proses tersebut dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD tidak mampu memediasi pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal yang dilakukan belum mampu meningkatkan PAD secara signifikan, sehingga tidak berdampak pada peningkatan kemandirian keuangan daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa belanja modal belum sepenuhnya diarahkan pada sektor produktif yang mampu menghasilkan pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa modal belanja yang dilaksanakan belum berhasil menciptakan aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan basis pendapatan daerah. Oleh karena itu, modal belanja belum menjadi alat efektif untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui kenaikan PAD. Secara mekanisme, modal belanja tanpa efek pengganda ekonomi tidak akan menaikkan pendapatan daerah, sehingga gagal memperkuat kemandirian fiskal. Hal ini memperkuat bahwa efektivitas modal belanja sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, akurasi alokasi, serta pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian (Azzahra et al., 2023) dan (Haptari et al., 2024) yang menyimpulkan bahwa modal belanja tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD, sehingga gagal mendorong kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, hasil ini bertentangan dengan penelitian (Ariyanto & Masdjojo, 2025) serta (Zein et al., 2024) yang menyatakan bahwa modal belanja mampu meningkatkan PAD dan pada akhirnya memperkuat kemandirian fiskal daerah jika terfokus pada sektor-sektor produktif. Perbedaan tersebut menggarisbawahi bahwa keberhasilan modal belanja sangat bergantung pada saling anggaran pengelolaan serta kondisi ekonomi spesifik setiap daerah.

Dalam perspektif Islam, setiap pengeluaran harus memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan. QS. Al-Baqarah ayat 261 menegaskan bahwa pengeluaran yang tepat akan menghasilkan manfaat yang berlipat. Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa hasil optimal hanya dapat dicapai apabila suatu tindakan dilakukan secara tepat sasaran. Dengan demikian, tidak adanya efek mediasi menunjukkan bahwa belanja modal belum dikelola secara optimal sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh upaya pajak dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel mediasi, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Upaya Pajak terhadap PAD

Upaya pajak terbukti memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan intensitas pemungutan pajak daerah belum mampu secara optimal meningkatkan PAD, yang kemungkinan disebabkan oleh rendahnya efektivitas pemungutan atau keterbatasan potensi ekonomi objek pajak.

2. Pengaruh Belanja Modal terhadap PAD

Belanja modal tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi belanja modal oleh pemerintah daerah belum memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah dalam jangka pendek.

3. Pengaruh Upaya Pajak terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Secara langsung, upaya pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Pengaruhnya terhadap kemandirian fiskal baru terlihat melalui peningkatan PAD sebagai variabel mediasi.

4. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Belanja modal memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan dapat meningkatkan beban fiskal dan menekan tingkat kemandirian daerah.

5. Pengaruh PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini menegaskan bahwa PAD merupakan faktor utama dalam menentukan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri.

6. Peran Variabel Mediasi (Uji Sobel)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD mampu memediasi secara signifikan hubungan antara upaya pajak dan kemandirian keuangan daerah. Namun demikian, PAD tidak mampu memediasi pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah:

5.2 KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil, antara lain:

1. Faktor Diluar Model: Nilai residual error pada model pertama cukup tinggi (0,9757), yang menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain di luar model (seperti Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi, atau Luas Wilayah) yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap PAD.
2. Periode Pengamatan: Penelitian ini hanya menggunakan periode pengamatan yang relatif singkat (3 tahun, 2022-2024), sehingga dampak jangka panjang dari belanja modal terhadap pendapatan daerah mungkin belum terlihat sepenuhnya (time lag)
3. Objek Penelitian: Fokus penelitian yang terbatas pada wilayah tertentu membuat generalisasi hasil penelitian mungkin berbeda jika diterapkan pada wilayah dengan karakteristik fiskal yang sangat kontras.

5.3 SARAN

1. Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang harus dipertimbangkan saat menginterpretasikan temuan, di antaranya:
 - Faktor Eksternal di Luar Model : Nilai residual error pada model pertama relatif tinggi (0,9757), menandakan adanya variabel lain di luar model (misalnya Dana Alokasi Umum, pertumbuhan ekonomi,

atau luas wilayah) yang berpotensi memberikan pengaruh lebih dominan terhadap PAD.

- Rentang Waktu Pengamatan : Studi ini terbatas pada periode pendek (3 tahun: 2022-2024), sehingga efek jangka panjang dari modal belanja terhadap pendapatan daerah mungkin belum tercermin secara lengkap (akibat time lag).
- Cakupan Objek Studi : Pembatasan fokus pada wilayah spesifik dapat membatasi generalisasi hasil, terutama jika diterapkan pada daerah dengan profil fiskal yang sangat berbeda.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya:

- Diharapkan dapat menambahkan variabel independen lain yang lebih dominan dalam mempengaruhi PAD dan Kemandirian, seperti Dana Transfer atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
- Memperpanjang periode pengamatan (misal 5-10 tahun) untuk menangkap efek investasi modal yang biasanya bersifat jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alazhari, M. A., Hendaris, R. B., Jenderal, U., & Yani, A. (2025). *Tax Effort, Flypaper Dynamics, and Fiscal Stress: An Empirical Study of Regional Financial Independence*. <https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i05.p18>
- Amri, K., Masbar, R., Nazamuddin, B. S., & Aimon, H. (2023). Does Tax Effort Moderate the Effect of Government Expenditure on Regional Economic Growth? A Dynamic Panel Data Evidence from Indonesia. *Ekonomika* , 102(2), 6–27. <https://doi.org/10.15388/Ekon.2023.102.2.1>
- Ariyanto, K., & Masdjojo, G. N. (2025). Determinan Belanja Modal Untuk Membangun Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2018-2022). *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 23(1), 45–54.
- Ayu, W. T. D. N., Gede, K. D. L., & Gd, N. H. W. I. (2024). Analisis Flypaper Effect dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah: Efek Moderasi Upaya Pajak. *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 1–19.
- Azzahra, A., Martini, R., & Yulina, B. (2023). *Government Financial Performance Provincial Regions in Indonesia: The Effect of Capital Expenditure , Remaining Budget Financing , and Prosperity Rate*. 2132–2141.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Australian Journal of Management*. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Frijunita, S., Gurendrawati, E., & Hesti Utamingtyas, T. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tax Effort, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 5(2), 256–269. <http://repository.unj.ac.id/id/eprint/49505>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). Akuntansi sektor publik. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Haptari, V. D., Sofilda, E., Ginting, A. M., & Aritonang, F. D. (2024). Factors Influencing Regional Governments to Enhance Regional Financial

Independence: Cases in Indonesian Provinces. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 17(9), 41–54.

Hartono, A., & Alvionita, Y. (2021). Analysis of Local Tax Efforts in Supporting Increasing Ponorogo Regency's Original Local Government Revenue. *Ekulibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(2), 164–175. <https://doi.org/10.24269/ekulibrium.v16i2.2021.pp164-175>

Ishak, J. F. (2021). The Determinants Factors of Regional Financial Independence. *Proceedings of the 2nd International Seminar of Science and Applied Technology (ISSAT 2021)*, 207(Issat), 559–564. <https://doi.org/10.2991/aer.k.211106.087>

Khairi, I., Nasution, Y. S. J., & Rahmani, N. A. B. (2025). Ratio Analysis of the Degree of Decentralization, Regional Financial Independence, Regional Financial Dependence, Effectiveness in the City of Medan Local Own-Source Revenue. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 9(1), 217–227. <https://doi.org/10.36555/jasa.v9i1.2814>

Kompas. (2024). *Otonomi Daerah: Ketergantungan Terhadap Transfer dari Pusat Masih Tinggi*. <https://www.kompas.id/>. <https://www.ojk.go.id/id/Publikasi/OJK-Daerah/Siaran-Pers-Daerah/Pages/Siaran-Pers-KOJK-Provinsi-Jawa-Timur-Pengembangan-dan-Penguatan-Sektor-Jasa-Keluangan-Provinsi-Jawa-Timur.aspx>

Kompas. (2025). *Hanya 4 Provinsi yang Tak Bergantung APBN, DPR Soroti Rendahnya PAD*. <https://www.kompas.id/>. <https://harianbhirawa.co.id/catatan-kritis-r-apbd-jatim-2025/>

Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.

Muhammad, N. F. (2021). *PENGARUH DANA PERIMBANGAN , PDRB PER KAPITA , TAX EFFORT , DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN / KOTA PROVINSI JAWA TENGAH*. 10, 1–9.

- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Lumban Tobing, C. E. R. (2021). *Penelitian bisnis, teknik dan analisa dengan SPSS-STATA-Eviews*. Madenatera.
- Pramesti, N. N., & Budi, R. B. H. (2025). The Effect of Capital Expenditure on Financial Performance with Local Revenue as a Mediating Variable. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 6(1), 450–459. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v6i1.3942>
- Rahayu, Y. S., & Hendaris, R. B. (2025). *Ekonomis : Journal of Economics and Business Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah , Ketergantungan Daerah dan Upaya Pajak terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023)*. 09(02), 1114–1125. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v9i2.2686>
- Riza, R., & Zuripal. (2023). Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, Efektifitas Pad Dan Tax Effort Terhadap Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Kota Bukittinggi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(5), 1961–1973. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1508>
- Septiani, L., Hartaty, S., & Febrianti, D. (2026). *Level of Financial Independence of Regional Governments f Districts And Cities In Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Tax Effort , Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2019-20*. 7(3), 2020–2028.
- Setiawan, D., & Winarna, J. (2022). The Determinants of Local Government Performance. *Quality - Access to Success*, 23(186), 93–97. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.186.12>
- Situmorang, B., Tjaraka, H., & Novita, S. (2025). The impact of public policy on budget realization during the COVID-19 pandemic in Indonesia. *Cogent Economics and Finance*, 13(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2025.2467442>

- Sudarwinti, & Rusydi, B. U. (2025). *The Influences of the Flypaper Effect and Fiscal Stress on Provincial Financial Performance in Sulampua Island with Tax effort as an Intervening Variabel*. 4(3), 191–204.
- Sugiyono, P. D. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND*. In *Alfabeta Bandung*. <https://doi.org/10.2307/jj.7616639.20>
- Yuliana, D., & Usman, S. (2022). Regional Financial Ratio Analysis in Pematang Regency For the 2016-2020 Financial Year. *Eduvest - Journal Of Universal Studies*, 2(4), 797–805. <https://doi.org/10.36418/edv.v2i4.407>
- Zein, M. H. M., Muhtarom, M., Mulyadi, M., & Septiani, S. (2024). Examining the Role of Local Government's Financial Performance and Capital Expenditure in Increasing Economic Growth in Banten Province, Indonesia (2018–2022). *Journal of Risk and Financial Management*, 17(10). <https://doi.org/10.3390/jrfm17100456>
- Aguirre, J. G., & Del Villar, A. (2022). Effect of the Complexity of the Customs Tax System on the Tax Effort. *Economies*, 10(3). <https://doi.org/10.3390/economies10030055>
- Akbar, A. (2022). The Effect Of Regional Native Income And Capital Expenditure On Regional Financial Independence In District /City Governments In West Java Province Year 2016 -2020. *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(4), 884–890. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i4.561>
- Amri, K., Masbar, R., Nazamuddin, B. S., & Aimon, H. (2023). Does Tax Effort Moderate the Effect of Government Expenditure on Regional Economic Growth? A Dynamic Panel Data Evidence from Indonesia. *Ekonomika*, 102(2), 6–27. <https://doi.org/10.15388/Ekon.2023.102.2.1>
- Arintoko, & Bawono, icuk R. (2021). The optimization of local tax revenues for local government within the framework of regional autonomy. *Public Policy and Administration*, 20(2), 176–188. <https://doi.org/10.13165/VPA-21-20-2-03>

- Ayu, W. T. D. N., Gede, K. D. L., & Gd, N. H. W. I. (2024). Analisis Flypaper Effect dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah: Efek Moderasi Upaya Pajak. *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 1–19.
- Berita Jatim. (2025). *Hasil Efisiensi Belanja APBD Jember 2025 Rp 57,9 MNo Title*. <https://Beritajatim.Com/>. <https://beritajatim.com/hasil-efisiensi-belanja-apbd-jember-2025-rp-579-m>
- DJPB Kemenkeu. (2025). Press Release APBN Regional Jawa Timur s.d. 31 Mei 2025. <https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/>. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jatim/id/data-publikasi/press-release/3069-press-release-apbn-regional-jawa-timur-s-d-31-mei-2025.html>
- Fauji, Z., & Syafitri, W. (2024). The impact of local governance and regional own-source revenue on economic growth at the district level in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 27(2), 153–174. <https://doi.org/10.24914/jeb.v27i2.11606>
- Haptari, V. D., Sofilda, E., Ginting, A. M., & Aritonang, F. D. (2024). Factors Influencing Regional Governments to Enhance Regional Financial Independence: Cases in Indonesian Provinces. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 17(9), 41–54.
- Harian Bhirawa. (2025). *Catatan Kritis R-APBD Jatim 2025*. <https://Harianbhirawa.Co.Id/>. <https://harianbhirawa.co.id/catatan-kritis-r-apbd-jatim-2025/>
- Hariani, E., & Febriyastuti, R. (2020). The Effect of Fiscal Stress, Original Local Government Revenue and Capital Expenditures on Efficiency Ratio of Government Independence Performance. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 12(1), 18–25. <https://doi.org/10.17977/um002v12i12020p018>
- Hartono, A., & Alvionita, Y. (2021). Analysis of Local Tax Efforts in Supporting Increasing Ponorogo Regency's Original Local Government Revenue. *Ekulilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(2), 164–175.

<https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v16i2.2021.pp164-175>

Jatim BPK. (2025). *Khofifah sampaikan P-APBD 2025 fokus “mandatory spending” di Jatim*. JATIM BPK. <https://jatim.bpk.go.id/dari-media/khofifah-sampaikan-p-apbd-2025-fokus-mandatory-spending-di-jatim/>

Jatim Viva. (2025). *DPRD Jatim Dorong Pemprov Lepas Ketergantungan Dana Transfer Pusat, Maksimalkan Potensi Daerah*. <https://Jatim.Viva.Co.Id/>.
<https://jatim.viva.co.id/kabar/21790-dprd-jatim-dorong-pemprov-lepas-ketergantungan-dana-transfer-pusat-maksimalkan-potensi-daerah>

Makhya, S., Usman, M., Warsono, W., & Mukhlis, M. (2023). Analysis of Local Government Financial Capability and its Implications for the Sustainability of Regional Autonomy: The Perspective of Public Interest. *The Journal of Society and Media*, 7(2), 486–513. <https://doi.org/10.26740/jsm.v7n2.p486-513>

Malang Times. (2025). *Dana Transfer dari Pemerintah Pusat Kena Pangkas Rp 168 Miliar, Begini Strategi Pemkot Batu Tahun Depan*. Malang Times. <https://malangtimes.com/baca/347445/20251012/105000/dana-transfer-dari-pemerintah-pusat-kena-pangkas-rp-168-miliar-begini-strategi-pemkot-batu-tahun-depan>

Nani. (2022). Step by Step Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Eviews (Nani, S.E.) (Z-Library).pdf. In A. N. Egi Gunawan Ahmad (Ed.), *Step by Step Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Eviews*. CV Visi Intelgensia.

OJK go.id. (2025). *Siaran Pers KOJK Provinsi Jawa Timur: Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan Provinsi Jawa Timur*. <https://www.ojk.go.id/>.
<https://www.ojk.go.id/id/Publikasi/OJK-Daerah/Siaran-Pers-Daerah/Pages/Siaran-Pers-KOJK-Provinsi-Jawa-Timur-Pengembangan-dan-Penguatan-Sektor-Jasa-Kuangan-Provinsi-Jawa-Timur.aspx>

Payapo, R., Ramly, F., & Bugis, M. (2023). Relationship Between Regional

- Revenue and Expenditures: A Canonical Correlation Analysis. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(2), 383–392.
<https://doi.org/10.37641/jimkes.v11i2.2051>
- Pramesti, N. N., & Budi, R. B. H. (2025). The Effect of Capital Expenditure on Financial Performance with Local Revenue as a Mediating Variable. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 6(1), 450–459.
<https://doi.org/10.38035/dijefa.v6i1.3942>
- Riza, R., & Zuripal. (2023). Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, Efektifitas Pad Dan Tax Effort Terhadap Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Kota Bukittinggi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(5), 1961–1973. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1508>
- Setiawan, D., & Winarna, J. (2022). The Determinants of Local Government Performance. *Quality - Access to Success*, 23(186), 93–97.
<https://doi.org/10.47750/QAS/23.186.12>
- Sholihat, I., & Lubis, T. A. (2024). Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu) Vol. 13 No. 05, Desember 2024 (Edisi Khusus). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu) Vol. 13 No. 05, Desember 2024*, 13(05), 1609–1622.
- Silitonga, N. (2021). The Moderating Effect Of Regional Indpendence On The Effect Of Financing Policies, Capital Expenditure And Transfer Fund Towards The Performance Of Local Governments. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(3), 5239–5251.
<https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i3.2153>
- Siplawfirm.id. (2025). *No Pengelolaan Efisiensi Anggaran dalam APBN dan APBD menurut Instruksi Presiden 1/2025*.
- Situmorang, B., Tjaraka, H., & Novita, S. (2025). The impact of public policy on budget realization during the COVID-19 pandemic in Indonesia. *Cogent Economics and Finance*, 13(1).

<https://doi.org/10.1080/23322039.2025.2467442>

Sugiyono, P. D. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND. In *Alfabeta Bandung*. <https://doi.org/10.2307/jj.7616639.20>

Surabaya Kompas. (2024). *Dana Transfer Pusat Dipotong, Emil Dardak Khawatirkan Daerah yang Kemandirian Fiskalnya Rendah*. <https://Surabaya.Kompas.Com/>.

<https://surabaya.kompas.com/read/2025/10/09/203447578/dana-transfer-pusat-dipotong-emil-dardak-khawatirkan-daerah-yang>

Utari Handayani, T., & Nuri, E. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2348–2361. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.216>

Van Slyke, D. M. (2007). Agents or stewards: Using theory to understand the government-nonprofit social service contracting relationship. *Agent or Stewards: Using Theory to Understand The Government- Nonprofit Social Service Contracting Relationship*, 17(2), 157–187. <https://doi.org/10.1093/jopart/mul012>

Yossinomita, Y., Effiyaldi, Feranika, A., Mardiana, R., Hassandi, I., Pangestu, M. G., & Fahdillah, Y. (2025). Analysis of Optimal Tax Ratio and Efficiency of Regional Tax Revenue: A Case Study of Provinces in Indonesia. *Journal of Tax Reform*, 11(1), 74–99. <https://doi.org/10.15826/jtr.2025.11.1.193>

Yuliana, D., & Usman, S. (2022). Regional Financial Ratio Analysis in Pematang Regency For the 2016-2020 Financial Year. *Eduvest - Journal Of Universal Studies*, 2(4), 797–805. <https://doi.org/10.36418/edv.v2i4.407>

Zulfikar, A. L., Swandari, S., Fitriah, R. R. A., & Mahardika, S. G. (2025). The Effect of Regional Taxes and Regional Levies on Regional Financial Independence which Impact Economic Growth. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(2), 225–232. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i2.3261>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data Awal

KABUPATEN	TAHUN	TE	BM	PAD	KKD
Kab. Bangkalan	2022	0,2070929 036	0,0974649 877	1,0246879 222	0,1576562 418
Kab. Bangkalan	2023	0,2176885 074	0,1118126 071	1,1901417 449	0,2209394 728
Kab. Bangkalan	2024	0,2496789 856	0,1198233 164	1,1729170 931	0,2257204 800
Kab. Banyuwangi	2022	0,2481358 639	0,2041453 648	0,9975968 867	0,2216311 671
Kab. Banyuwangi	2023	0,2527599 923	0,2446440 615	0,8805423 106	0,2198464 498
Kab. Banyuwangi	2024	0,2740527 556	0,1591103 036	0,9876759 943	0,2457011 567
Kab. Blitar	2022	0,2987203 781	0,1560062 646	1,2561451 387	0,2348179 296
Kab. Blitar	2023	0,2626057 773	0,1644512 370	0,9901514 372	0,2151188 022
Kab. Blitar	2024	0,2874596 182	0,1496136 120	0,9850544 758	0,2301285 779
Kab. Bojonegoro	2022	0,1591527 670	0,2346382 868	1,0242380 560	0,1710542 219
Kab. Bojonegoro	2023	0,1582235 259	0,3306904 189	0,8884288 398	0,1897839 909
Kab. Bojonegoro	2024	0,1803473 361	0,2953977 000	1,1309763 134	0,2280797 568
Kab. Bondowoso	2022	0,1807591 086	0,1001607 829	0,8934200 566	0,1232707 258
Kab. Bondowoso	2023	0,1623141 683	0,0879443 021	0,9142973 293	0,1312512 397
Kab. Bondowoso	2024	0,1765223 865	0,0747340 297	1,1138970 352	0,1868387 693
Kab. Gresik	2022	0,4782222 738	0,0872681 183	0,9804448 159	0,6356910 162
Kab. Gresik	2023	0,4169452 129	0,1342256 264	0,6732067 413	0,6127645 520
Kab. Gresik	2024	0,5092499 880	0,1147946 521	0,8686991 665	0,6790654 280
Kab. Jember	2022	0,3334958 139	0,1991922 763	0,9871405 488	0,2318647 351
Kab. Jember	2023	0,2775530 016	0,0629773 325	0,8062206 038	0,2544822 400

KABUPATEN	TAHUN	TE	BM	PAD	KKD
Kab. Jember	2024	0,2934316 267	0,0707045 228	0,8336202 170	0,2538636 437
Kab. Jombang	2022	0,3748698 515	0,1245194 632	1,0249196 936	0,2718597 969
Kab. Jombang	2023	0,3396354 932	0,0907792 680	1,0855768 994	0,3034384 172
Kab. Jombang	2024	0,3848441 560	0,0843413 846	1,0848951 000	0,3009426 436
Kab.Kediri	2022	0,5349258 579	0,1175698 406	1,4305486 280	0,3030068 622
Kab.Kediri	2023	0,4766153 144	0,1601538 545	1,1374249 228	0,2738596 521
Kab.Kediri	2024	0,5362320 289	0,0946145 034	1,0726538 909	0,2993422 805
Kab. Lamongan	2022	0,3390857 383	0,1544783 905	1,0669213 710	0,2351390 767
Kab. Lamongan	2023	0,2983922 171	0,1123241 034	0,9619662 233	0,2161974 965
Kab. Lamongan	2024	0,3409496 201	0,1208869 014	1,0563488 020	0,2242002 770
Kab. Lumajang	2022	0,2572770 562	0,1338720 181	1,1768755 916	0,2220103 660
Kab. Lumajang	2023	0,2387572 604	0,0746132 058	0,9316748 423	0,2095777 426
Kab. Lumajang	2024	0,2696612 179	0,0833140 383	1,1988575 034	0,2287879 037
Kab. Madiun	2022	0,4279040 356	0,1548232 323	1,3268469 065	0,2588009 691
Kab. Madiun	2023	0,3954075 101	0,1488184 527	1,0429354 869	0,1970402 291
Kab. Madiun	2024	0,7506502 279	0,1202048 729	1,0144011 933	0,2027617 308
Kab. Magetan	2022	0,3138057 206	0,1104678 016	1,1666871 510	0,1653487 021
Kab. Magetan	2023	0,2817237 998	0,1196814 277	0,9029278 664	0,1518381 699
Kab. Magetan	2024	0,3212692 575	0,0959297 593	1,0687433 619	0,1808657 786
Kab. Malang	2022	0,3426304 365	0,1749697 882	0,7802612 439	0,2934417 133
Kab. Malang	2023	0,3242174 998	0,1328543 209	0,7475501 633	0,2874151 639

KABUPATEN	TAHUN	TE	BM	PAD	KKD
Kab. Malang	2024	0,3800581 672	0,1314753 913	0,8947902 607	0,2802200 210
Kab. Mojokerto	2022	0,3860831 502	0,1301589 610	1,2113203 738	0,4319511 557
Kab. Mojokerto	2023	0,3192077 255	0,1433519 725	0,9383209 628	0,3753953 697
Kab. Mojokerto	2024	0,3498968 478	0,1585552 935	1,0498801 978	0,3975613 964
Kabu. Nganjuk	2022	0,4382635 275	0,1670588 186	1,3070943 138	0,2584817 193
Kabu. Nganjuk	2023	0,4135142 478	0,1458512 130	1,0278907 843	0,1996263 126
Kabu. Nganjuk	2024	0,4535891 572	0,1341947 973	1,0096360 707	0,2287219 240
Kab. Ngawi	2022	0,3384266 259	0,1279169 913	1,2378426 554	0,1796019 129
Kab. Ngawi	2023	0,3539638 339	0,1424762 208	1,0412270 025	0,1594044 868
Kab. Ngawi	2024	0,3820039 517	0,1263450 917	0,9947012 951	0,1646336 236
Kab. Pacitan	2022	0,2345260 355	0,1422208 197	0,9978256 364	0,1215351 521
Kab. Pacitan	2023	0,2062049 659	0,1462003 034	0,9765646 403	0,1526553 272
Kab. Pacitan	2024	0,2533631 279	0,1140201 334	1,0280030 119	0,1589450 310
Kab. Pamekasan	2022	0,2415292 145	0,1269531 650	0,9852664 108	0,1507315 153
Kab. Pamekasan	2023	0,2401782 632	0,1191212 696	1,1603189 697	0,1926098 641
Kab. Pamekasan	2024	0,2637849 624	0,0661728 405	0,9819680 173	0,1927811 701
Kab. Pasuruan	2022	0,2620965 801	0,1382208 658	1,0972103 648	0,3178508 202
Kab. Pasuruan	2023	0,2496264 705	0,1197939 420	1,1197146 152	0,3222748 926
Kab. Pasuruan	2024	0,2569726 505	0,0883924 782	1,2636435 539	0,3766851 027
Kab. Ponorogo	2022	0,5011876 211	0,1648619 981	1,0531944 118	0,1842102 052
Kab. Ponorogo	2023	0,4359786 030	0,1399137 236	1,0909773 813	0,2130855 074

KABUPATEN	TAHUN	TE	BM	PAD	KKD
Kab. Ponorogo	2024	0,4903447 369	0,0893509 127	0,9870298 450	0,2021235 758
Kab. Probolinggo	2022	0,2159657 540	0,0982196 741	1,0144099 572	0,1369489 369
Kab. Probolinggo	2023	0,1856828 383	0,1029445 234	1,0358386 608	0,1532188 995
Kab. Probolinggo	2024	0,2286998 327	0,1050741 098	1,0375712 377	0,1820294 270
Kab. Sampang	2022	0,1578956 393	0,2478242 708	1,0599970 210	0,1222747 928
Kab. Sampang	2023	0,1413588 392	0,1361152 922	1,5762068 191	0,2059436 773
Kab. Sampang	2024	0,1506434 708	0,0873580 366	1,0541106 544	0,2311325 899
Kab. Sidoarjo	2022	0,4955819 251	0,1744210 888	0,9917500 158	0,8065795 712
Kab. Sidoarjo	2023	0,4408216 163	0,1485856 687	0,9675691 427	0,8215935 995
Kab. Sidoarjo	2024	0,4741408 662	0,1272204 083	1,1110966 257	0,9542172 000
Kab. Situbondo	2022	0,2492457 595	0,1495237 473	1,1083958 904	0,1887035 625
Kab. Situbondo	2023	0,2184078 090	0,1629197 738	0,8490626 754	0,1804368 231
Kab. Situbondo	2024	0,2394968 581	0,1449601 900	0,9024734 395	0,1904668 537
Kab. Sumenep	2022	0,1172651 223	0,0833389 013	1,0547925 287	0,1292597 683
Kab. Sumenep	2023	0,1039929 461	0,0947918 879	1,0924285 636	0,1345831 364
Kab. Sumenep	2024	0,1184992 137	0,1238107 760	1,1148676 213	0,1391341 286
Kab. Trenggalek	2022	0,2314983 102	0,2549222 921	1,7019807 071	0,2860993 434
Kab. Trenggalek	2023	0,0780433 086	0,1038694 633	0,8514787 415	0,1749883 213
Kab. Trenggalek	2024	0,2421503 353	0,0811467 420	0,9423832 059	0,1839474 260
Kab. Tuban	2022	0,3934500 485	0,1912202 187	1,0329497 527	0,3115627 207
Kab. Tuban	2023	0,3893294 637	0,3446362 705	0,9861883 737	0,2785246 094

KABUPATEN	TAHUN	TE	BM	PAD	KKD
Kab. Tuban	2024	0,4200031 664	0,2979904 140	1,2003978 384	0,3166713 639
Kab. Tulungagung	2022	0,3026653 775	0,1208256 688	1,1580329 693	0,3115520 331
Kab. Tulungagung	2023	0,2670024 824	0,0870049 394	1,1836190 257	0,3782974 337
Kab. Tulungagung	2024	0,3263602 534	0,0759077 729	1,1324621 169	0,3445740 587
Kota Batu	2022	0,9989858 886	0,1132269 761	1,0076494 354	0,2966227 574
Kota Batu	2023	0,9182501 239	0,1132688 196	0,8144788 001	0,3111952 953
Kota Batu	2024	1,0698193 796	0,0927785 794	0,9164544 056	0,3648296 277
Kota Blitar	2022	0,5759686 167	0,1550433 303	0,7742376 980	0,2396236 398
Kota Blitar	2023	0,6158110 675	0,1480568 048	0,8596714 696	0,2717740 139
Kota Blitar	2024	0,5896984 111	0,1356403 549	0,9046901 658	0,2595338 637
Kota Kediri	2022	0,0165785 101	0,1140626 136	1,0749365 763	0,3150154 195
Kota Kediri	2023	0,0799223 374	0,1321836 725	1,0209334 454	0,3458590 141
Kota Kediri	2024	0,0883358 640	0,0975859 085	1,1141129 231	0,3977482 804
Kota Madiun	2022	0,6711422 763	0,1994443 402	1,0000000 000	0,3788093 812
Kota Madiun	2023	0,5985890 329	0,1847948 658	0,8967069 148	0,3335591 450
Kota Madiun	2024	0,6514410 183	0,1357836 754	1,0987151 778	0,3604632 021
Kota Malang	2022	0,6455178 046	0,1420400 790	0,9542259 217	0,5964557 718
Kota Malang	2023	0,5996429 553	0,1598902 326	0,6115039 130	0,6151150 127
Kota Malang	2024	0,6934423 762	0,0781592 697	0,8759486 927	0,6759794 834
Kota Mojokerto	2022	0,8675504 187	0,2459648 756	1,0238789 130	0,3766566 015
Kota Mojokerto	2023	0,7715510 342	0,2166403 680	1,0806701 921	0,3845306 566

KABUPATEN	TAHUN	TE	BM	PAD	KKD
Kota Mojokerto	2024	1,0558375 665	0,1436541 939	0,9912708 673	0,4180157 979
Kota Pasuruan	2022	0,4935076 410	0,1381049 747	1,1752451 742	0,2401613 088
Kota Pasuruan	2023	0,4616091 186	0,1527661 913	0,9946550 043	0,2562712 657
Kota Pasuruan	2024	0,5552051 101	0,1212879 733	1,0605485 027	0,2830526 055
Kota Probolinggo	2022	0,4302938 826	0,2320768 631	0,8658350 369	0,2891764 803
Kota Probolinggo	2023	0,3646385 781	0,1188937 641	0,9510831 918	0,3295294 805
Kota Probolinggo	2024	0,4121025 279	0,0725748 203	0,9978788 159	0,3068983 819
Kota Surabaya	2022	0,6341395 486	0,1869164 065	0,8771614 218	2,1121133 903
Kota Surabaya	2023	0,5778251 499	0,1834853 350	0,7955543 584	2,0939931 513
Kota Surabaya	2024	0,6193110 624	0,1897613 768	0,9282977 378	2,1408338 419

Lampiran 2 Hasil Output E-Views 12

2.1 Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	Z
X1	1	0.09060193397639992	-0.2145368248782558
X2	0.09060193397639992	1	0.02297047546122891
Z	-0.2145368248782558	0.02297047546122891	1

2.2 Hasil Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)

Method: Panel Least Squares

Date: 02/26/26 Time: 15:34

Sample: 2022 2024

Periods included: 3

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 114

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	0.021247	0.043639	0.486885	0.6278
X1	0.069331	0.098711	0.702361	0.4847
X2	0.079520	0.129299	0.615005	0.5405
Z	0.019594	0.039590	0.494915	0.6221

2.3 Hasil Uji T

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 02/26/26 Time: 19:01
Sample: 2022 2024
Periods included: 3
Cross-sections included: 38
Total panel (balanced) observations: 114

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.247176	0.100361	-12.42689	0.0000
X1	0.102100	0.227015	0.449750	0.6542
X2	-0.737912	0.297362	-2.481525	0.0154
Z	0.507690	0.091048	5.576042	0.0000

Dependent Variable: Z
Method: Panel Least Squares
Date: 02/26/26 Time: 15:53
Sample: 2022 2024
Periods included: 3
Cross-sections included: 38
Total panel (balanced) observations: 114

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.072842	0.046511	23.066560	0.0000
X1	-0.166253	0.070791	-2.348501	0.0206
X2	0.123747	0.269149	0.459773	0.6466

2.4 Hasil Uji F

Sub 1	
R-squared	0.047839
Adjusted R-squared	0.030683
S.E. of regression	0.153408
Sum squared resid	2.612261
Log likelihood	53.47200
F-statistic	2.788484

Prob(F-statistic)	0.065829
-------------------	----------

R-squared	0.978974
Adjusted R-squared	0.967453
S.E. of regression	0.098024
Sum squared resid	0.701429
Log likelihood	128.4185
F-statistic	84.97336
Prob(F-statistic)	0.000000

2.5 Hasil Koefisien Determinasi (R-Square)

R-squared	0.047839
Adjusted R-squared	0.030683

R-squared	0.978974
Adjusted R-squared	0.967453

2.6 Hasil Uji Sobel

Input:		Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a	-0.166253	Sobel test: -2.16436983	0.03899749	0.03043598
b	0.507690	Aroian test: -2.13540059	0.03952653	0.0327283
s _a	0.070791	Goodman test: -2.194551	0.03846116	0.02819582
s _b	0.091048	Reset all	Calculate	

Input:		Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a	0.123747	Sobel test: 0.45821635	0.13710797	0.64679701
b	0.507690	Aroian test: 0.45106833	0.1392807	0.6519403
s _a	0.269149	Goodman test: 0.46571533	0.13490025	0.64141928
s _b	0.091048	Reset all	Calculate	

Lampiran Biodata Penulis

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Chrystine Amelia Prameswari
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 03 Januari 2003
Alamat Asal : Lingk. Bence 02 RT/RW 02 Kec Garum Kab Blitar
Telepon/HP : 081977189547
E-mail : amelprameswari0301@gmail.com

Pendidikan Formal

2009–2010 : SD Negeri Bence 02
2010–2016 : SMP Negeri 7 Kota Blitar
2016–2019 : SMA Negeri 2 Kota Blitar
2022–2026 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2022-2023 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab
(PKPBA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2023-2024 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab
(PKPBA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2025 : Sertifikasi *Certified Accurate Professional* (CAP)

Riwayat Organisasi

- UKM Unit Olahraga (UNIOR) UIN MALANG



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd
NIP : 198409302023211006
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Chrystine Amelia Prameswari
NIM : 220502110146
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : **PENGARUH UPAYA PAJAK (*TAX EFFORT*) DAN BELANJA MODAL
TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DENGAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING***

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDE	INTERNET SOURCE	PUBLICATIO	STUDENT PAPE
17%	13%	13%	15%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 April 2026
UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd